



BUPATI PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 63 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025-2029
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PASURUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial dan untuk mewujudkan sinergitas pelaksanaan pembangunan, perlu perencanaan pembangunan daerah dalam satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional yang disusun secara berjenjang oleh Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah;
 - b. bahwa pembangunan daerah yang efektif, efisien dan tepat sasaran, perlu menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah yang memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, dan subkegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah setelah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856).
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 Nomor 5).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.
2. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Bupati dan Wakil Bupati Pasuruan.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2025-2029.
5. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

- (1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.

- (2) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2026 sampai dengan tahun 2030.

Pasal 3

- (1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika:
- a. bab I berisi pendahuluan;
 - b. bab II berisi gambaran pelayanan, permasalahan, dan isu strategis Perangkat Daerah;
 - c. bab III berisi tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan;
 - d. bab IV berisi program, kegiatan, sub kegiatan, dan kinerja penyelenggaraan bidang urusan; dan
 - e. bab V berisi penutup.
- (2) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka:

- a. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 16);
- b. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 17 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 17);
- c. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 18 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 18);
- d. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 19);
- e. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 20 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 20);
- f. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 21 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 21);
- g. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 22);
- h. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 23);

- i. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 24);
- j. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 25 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 25);
- k. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 26 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 26);
- l. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 27 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 27);
- m. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 28 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 28);
- n. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 29 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 29);
- o. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 30 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 30);
- p. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 31 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 31);
- q. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 32 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 32);
- r. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 33 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 33);
- s. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 34 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 32);
- t. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 33);
- u. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 36);
- v. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 37 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 37);

- w. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 38 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Dinas Perikanan Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 38);
- x. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 39 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Dinas Pariwisata Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 39);
- y. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 40 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 40);
- z. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 41 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 41);
- aa. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 42 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 42);
- bb. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 43 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 43);
- cc. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 44 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 44);
- dd. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 45 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 45);
- ee. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 46 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 46);
- ff. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 48 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 48);
- gg. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 49);
- hh. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 50 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Kecamatan Gondangwetan Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 50);
- ii. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 51 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 51);
- jj. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 52 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Kecamatan Kejayan Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 52);

- kk. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 53 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 53);
- ll. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 54 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 54);
- mm. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 56 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Kecamatan Lumbang Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 56);
- nn. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 57 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 57);
- oo. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 58 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 58);
- pp. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 59 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Kecamatan Pasrepan Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 59);
- qq. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 60 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Kecamatan Pohjentrek Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 60);
- rr. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 61 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 61);
- ss. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 62);
- tt. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 63 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 63);
- uu. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 64 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Kecamatan Puspo Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 64);
- vv. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 65 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 65);
- ww. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 66 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 66);
- xx. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 67 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 67);
- yy. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 68 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Kecamatan Tosari Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 68);
- zz. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 69 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Kecamatan Tuter Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 69);

- aaa. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 70 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 70);
 - bbb. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 71 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Kecamatan Wonorejo Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 71).
 - ccc. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 73 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 73);
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan

pada tanggal 3 - 11 - 2025

BUPATI PASURUAN,



MOCHAMAD RUSDI SUTEJO

Diundangkan di Pasuruan

pada tanggal 3 - 11 - 2025

SEKRETARIS DAERAH,



YUDHA TRIWIDYA SASONGKO

BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2025 NOMOR 63

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 63 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH TAHUN
2025-2029

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025-2029

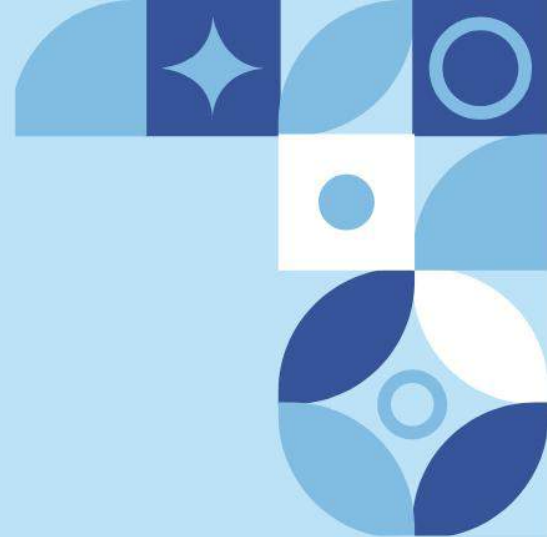
- I. DINAS PENDIDIKAN;
- II. DINAS KESEHATAN DAERAH, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA;
- III. DINAS SUMBER DAYA AIR, BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI;
- IV. DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG;
- V. DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN;
- VI. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA;
- VII. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH;
- VIII. DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK;
- IX. DINAS KETENAGAKERJAAN;
- X. DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN;
- XI. DINAS LINGKUNGAN HIDUP;
- XII. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL;
- XIII. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA;
- XIV. DINAS PERHUBUNGAN;
- XV. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA;
- XVI. DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN;
- XVII. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYAN TERPADU SATU PINTU;
- XVIII. DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA;
- XIX. DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA;
- XX. DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN;
- XXI. SEKRETARIAT DAERAH;
- XXII. SEKRETARIAT DPRD;
- XXIII. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH;
- XXIV. BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH;
- XXV. BADAN PENDAPATAN DAERAH;
- XXVI. BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA;
- XXVII. INSPEKTORAT DAERAH;
- XXVIII. KECAMATAN BANGIL;
- XXIX. KECAMATAN BEJI;
- XXX. KECAMATAN GEMPOL;
- XXXI. KECAMATAN GONDANG WETAN;
- XXXII. KECAMATAN GRATI;
- XXXIII. KECAMATAN KEJAYAN;
- XXXIV. KECAMATAN KRATON;

- XXXV. KECAMATAN LEKOK;
- XXXVI. KECAMATAN LUMBANG;
- XXXVII. KECAMATAN NGULING;
- XXXVIII. KECAMATAN PANDAAN;
- XXXIX. KECAMATAN PASREPAN;
- XL. KECAMATAN POHJENTREK;
- XLI. KECAMATAN PRIGEN;
- XLII. KECAMATAN PURWODADI;
- XLIII. KECAMATAN PURWOSARI;
- XLIV. KECAMATAN PUSPO;
- XLV. KECAMATAN REJOSO;
- XLVI. KECAMATAN REMBANG;
- XLVII. KECAMATAN SUKOREJO;
- XLVIII. KECAMATAN TOSARI;
- XLIX. KECAMATAN TUTUR;
- L. KECAMATAN WINONGAN;
- LI. KECAMATAN WONOREJO; DAN
- LII. BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK.

BUPATI PASURUAN,



MOCHAMAD RUSDI SUTEJO



RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025 - 2029



**DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PASURUAN**

Komplek Perkantoran Pemkab Pasuruan
Jl. Raya Raci KM.9 Bangil – Pasuruan, 67153

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT, atas berkat rahmat-Nya, kami masih diberikan kemampuan untuk melaksanakan penyusunan Rencana Strategis Dinas Pendidikan Tahun 2025 – 2029. Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 – 2029 merupakan rangkaian perencanaan program dalam pembangunan Pendidikan di Kabupaten Pasuruan yang merupakan penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah, baik anggaran pembangunan maupun rutin serta sumber-sumber lainnya.

Penyusunan Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 – 2029 Dinas Pendidikan juga mengacu kepada prioritas Pembangunan Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 – 2029. Dalam urusan Pendidikan Rencana Strategis ini merupakan kegiatan yang juga merupakan solusi dari persoalan, masalah serta isu yang sedang dan diperkirakan akan terjadi yaitu dengan harapan agar diketahui seberapa besar, sasaran, target kinerja yang akan dicapai dan seberapa besar pagu indikatif sebagai upaya memberikan arah/pedoman untuk rencana kegiatan Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan selama Tahun 2025 – 2029.

Pada kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan partisipasinya dengan harapan pelaksanaan nanti senantiasa diberikan kelancaran dan dapat diwujudkan serta memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pada akhirnya kami berharap agar Rencana Strategis ini dapat bermanfaat dan dijadikan panduan serta acuan bagi Dinas Pendidikan dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta peranannya masing-masing dalam upaya peningkatan pelayanan kepada Masyarakat selama 5 tahun mendatang.

Penyusun,



TRI KRISNI ASTUTI, S.Sos, MM
NIP. 197004241997032007

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR TABEL.....iii

BAB I 1

PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum 6

1.3 Maksud dan Tujuan..... 11

1.3.1 Maksud..... 11

1.3.2 Tujuan 12

1.4 Sistematika Penulisan 12

BAB II..... 14

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH..... 14

2.1 Gambaran Layanan Perangkat Daerah 14

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah..... 14

2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah 28

2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah..... 33

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan 36

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah..... 39

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Darah 39

2.2.2 Isu Strategis 42

BAB III 52

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 52

3.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah 52

3.2 Strategi dan Arah Kebijakan..... 54

3.2.1 Strategi..... 54

BAB IV 57

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA 57

4.1 Program, Kegiatan dan Sub kegiatan..... 58

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan 129

4.2.1 Kinerja Tujuan dan Sasaran Renstra..... 129

4.2.2 Kinerja Penyelenggara Urusan 130

BAB V 133

PENUTUP 133

DAFTAR TABEL

Tabel	2.1.2 A.1	Rekapitulasi Jumlah Pegawai Dinas Pendidikan. Berdasarkan Status Kepegawaian	29
Tabel	2.1.2 A.2	Rekapitulasi Jumlah Pegawai Dinas Pendidikan Berdasarkan Jenjang Pendidikan dan Status Kepegawaian	30
Tabel	2.1.2 B	Rekapitulasi Aset Dinas Pendidikan	31
Tabel	2.1.2 C	Jumlah Satuan Pendidikan Menurut Bentuk dan Status di Kabupaten Pasuruan	31
Tabel	2.1.2 D	Kebutuhan ASN Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan Tahun 2026 – 2030	32
Tabel	2.1.3	Kondisi Capaian Kerja 5 (lima) Tahun Terakhir	34
Tabel	2.1.4	Jumlah Peserta Didik pada Satuan Pendidikan di Kabupaten Pasuruan	37
Tabel	2.2.1.1	Pemetaan Permasalahan Dinas Pendidikan	39
Tabel	2.2.2	Tujuan dan Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan Tahun 2026-2030	40
Tabel	2.2.1.A	Isu Strategis Nasional Pendidikan	42
Tabel	2.2.1.B	Perbandingan Capaian Rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah Kabupaten Pasuruan dengan Provinsi Jawa Timur Tahun 2020-2024	47
Tabel	2.2.1.C	Rekapitulasi Jumlah Anak Tidak Sekolah Kabupaten Pasuruan Tahun 2025	50
Tabel	2.2	Permasalahan dan Isu Strategis	51
Tabel	3.1	Tujuan dan Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah	53
Tabel	3.2	Penahapan Renstra OPD	55
Tabel	3.2	Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah	56
Tabel	4.1.1	Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Pendanaan	60
Tabel	4.1.2	Daftar Subkegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	115
Tabel	4.2.1	Indikator Kinerja Utama	129
Tabel	4.2.2	Indikator Kinerja Kunci	130

I. DINAS PENDIDIKAN

RENCANA STRATEGIS DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2025 – 2029

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada hakekatnya mengamanatkan bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat serta peningkatan daya saing daerah. Prinsip-prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan bagi masyarakat sangat diperhatikan. Sedangkan Daerah juga diberi keleluasaan dalam mengembangkan muatan lokal dan kekhasan daerah.

Sebagaimana diamanatkan dalam pasal 277 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tersebut maka ditetapkanlah Peraturan Menteri Dalam Negeri 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sebagai petunjuk pelaksanaan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut mengatur tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Renstra Perangkat Daerah, dan Renja Perangkat Daerah.

Hal inilah yang melatar belakangi penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan. Berikut secara detail perubahan kebijakan nasional yang mendasar berdampak terhadap penyusunan RENSTRA Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan :

Pertama, berlakunya Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang bertujuan untuk menyediakan informasi secara berjenjang melalui penggolongan, pemberian kode, dan daftar penamaan yang akan digunakan Pemerintah Daerah dalam perencanaan pembangunan dan keuangan daerah yang disusun secara sistematis sebagai pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan keuangan daerah. Adapun informasi tersebut, memiliki maksud sebagai berikut:

- 1) Membantu Kepala Daerah dalam Menyusun perencanaan pembangunan dan anggaran daerah serta laporan pengelolaan keuangan daerah;
- 2) Membantu Kepala Daerah dalam merumuskan kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah;
- 3) Membantu Kepala Daerah dalam melakukan evaluasi kinerja dan keuangan daerah;
- 4) Menyediakan statistik keuangan Pemerintah Daerah;
- 5) Mendukung keterbukaan informasi kepada masyarakat;
- 6) Mendukung penyelenggaraan system informasi Pemerintahan Daerah; dan
- 7) Melakukan evaluasi perencanaan pembangunan daerah dan pengelolaan keuangan daerah.

Kedua, Menjelaskan adanya pemutakhiran terhadap Permendagri 90 Tahun 2019 melalui keputusan menteri dalam negeri

Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 merupakan perubahan ketiga atas Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Menteri dalam Negeri melakukan pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur berdasarkan usulan Pemerintah Daerah, perubahan kebijakan dan/atau peraturan perundang-undangan.

Ketiga, berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai pengganti dari Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005. Melalui perubahan regulasi ini, maka berdampak pula terhadap perubahan klasifikasi belanja dalam struktur APBD.

Keempat, berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perangkat Daerah sebagai perubahan dari Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.

Kelima, Instruksi Meteri Dalam Negeri No 2 Tahun 2025 tentang Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025 – 2029 yang melatar belakangi penyusunan RENSTRA Dinas Pendidikan Tahun 2025 – 2029 dimana ada penyesuaian sistematika dari dokumen Renstra Perangkat Daerah.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka kebijakan – kebijakan tersebut serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 – 2029 menjadi dasar penting atas penyusunan RENSTRA Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan. Adapun tahapan dan keterkaitan penyusunan RENSTRA Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan terhadap dokumen perencanaan lainnya yang diatur dalam pasal 108 sampai dengan Pasal 124 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai berikut:

- 1) Persiapan penyusunan RENSTRA Perangkat Daerah;
- 2) Penyusunan Rancangan Awal RENSTRA Perangkat Daerah;
- 3) Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah;

- 4) Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
- 5) Penyusunan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah; dan
- 6) Penetapan Renstra Perangkat Daerah.



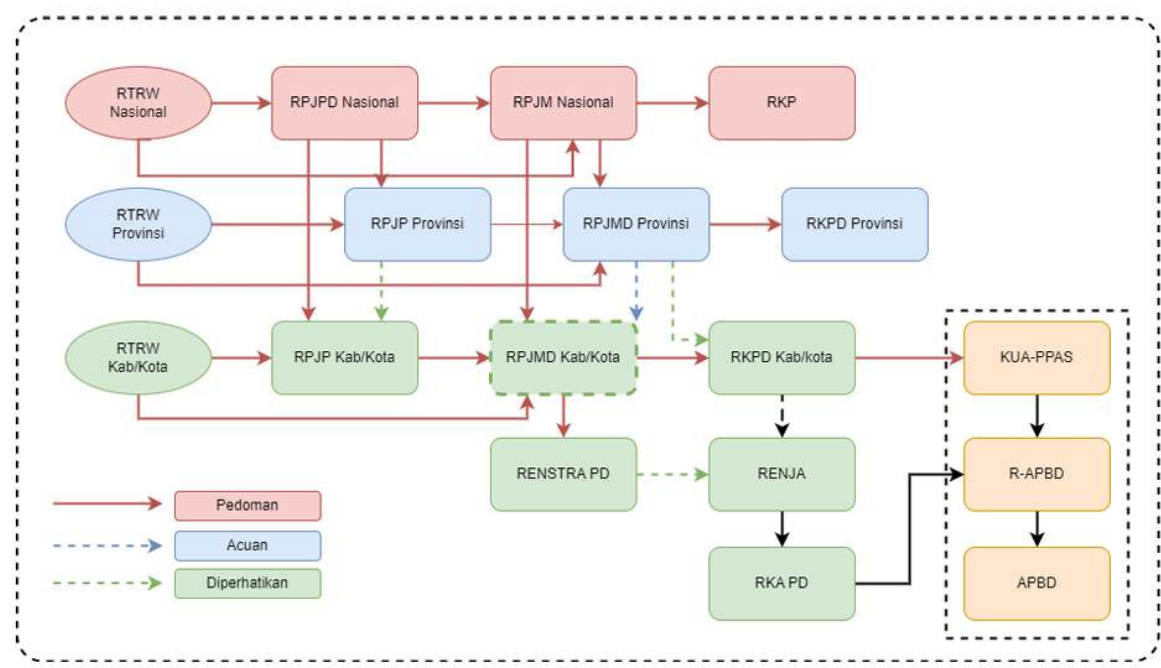
Gambar 1.1

Skema Penyusunan Renstra Perangkat Daerah

Materi yang dimuat dalam Renstra Perangkat Daerah adalah tujuan, sasaran, program dan kegiatan. Dalam Renstra Perangkat Daerah juga dicantumkan Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 – 2029. Hal itu sebagai bentuk komitmen Perangkat Daerah dalam mendukung atau memberikan kontribusi dalam pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

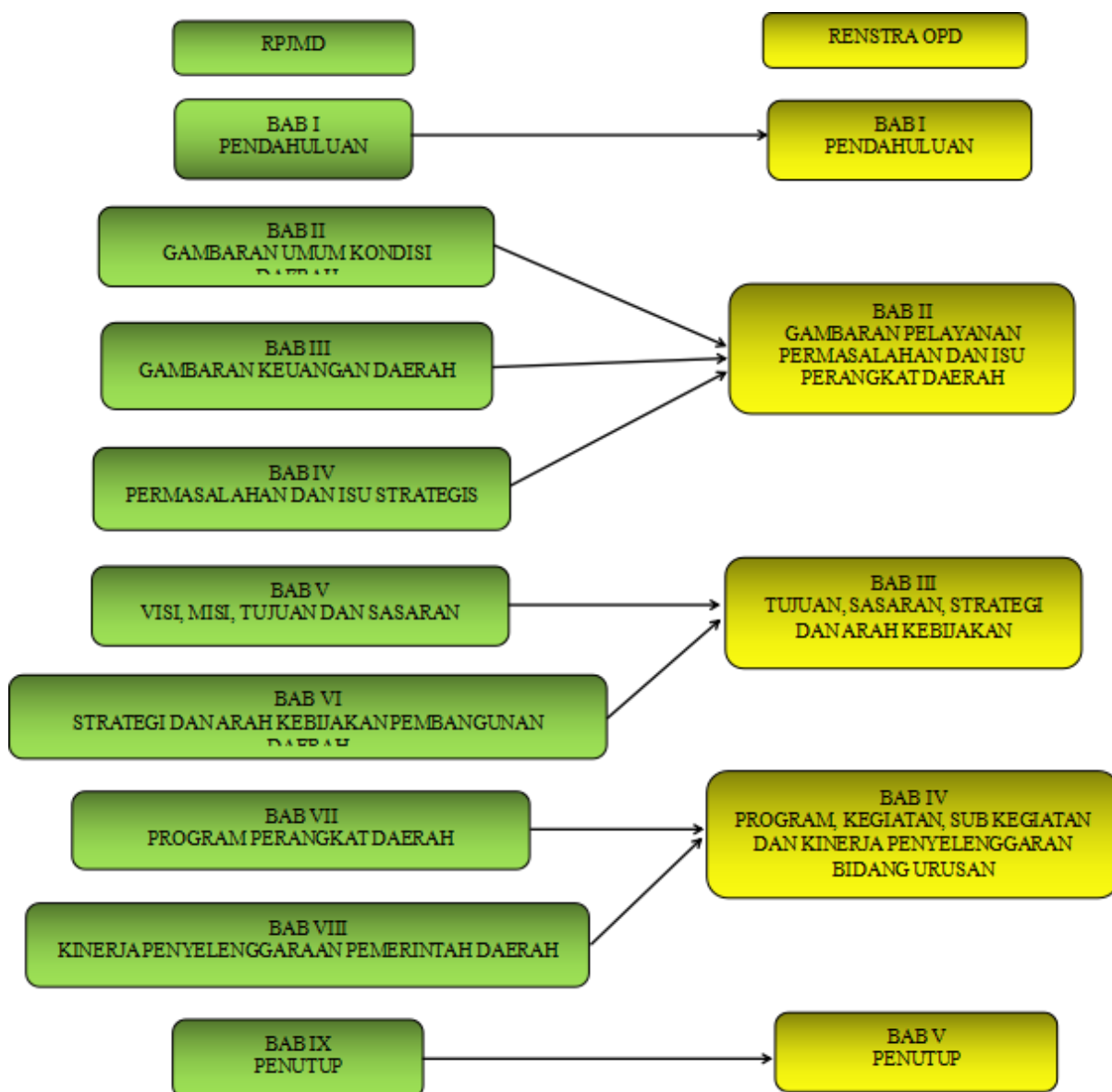
Renstra Perangkat Daerah disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Disamping itu juga berdasarkan pada analisis capaian kinerja periode sebelumnya,

mengkaji potensi, peluang dan tantangan yang dihadapi Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya. Penyusunan Renstra Perangkat Daerah juga mempertimbangkan prioritas dan isu strategis dari Renstra Kementerian terkait atau Renstra Pemerintah Provinsi. Adapun Gambaran keterkaitan antar dokumen seperti pada gambar berikut ini :



Gambar 1.2
Keterkaitan Dokumen Perencanaan Pemerintah Pusat,
Daerah dan Perangkat Daerah

Untuk Gambaran keterkaitan isi dari RPJMD Kabupaten Pasuruan tahun 2025-2029 dan Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029 sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, adalah sebagai berikut :



Gambar 1.3

**Keterkaitan antara RPJMD dengan Renstra Perangkat Daerah
Berdasarkan Inmendagri No.2 Tahun 2025**

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan RENSTRA Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18 tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang ;

- 2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
- 3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 5) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Nomor 82 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Nomor 183 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);
- 7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 244 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 8) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

- 9) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);
- 10) Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 194);
- 11) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 12) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 13) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor : 114 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor : 187 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6402);
- 14) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
- 15) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
- 16) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

- 17) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
- 18) Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik – Integratif;
- 19) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1990); Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
- 20) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
- 21) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
- 22) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
- 23) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
- 24) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang

- Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- 25) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
 - 26) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang penilaian dan pemberian penghargaan dan/atau insentif inovasi daerah;
 - 27) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
 - 28) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 - 29) Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 - 30) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 - 31) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
 - 32) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
 - 33) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan

- Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 34) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 – 2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 4 Seri D);
- 35) Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pasuruan tahun 2025–2045;
- 36) Peraturan Daerah Pasuruan Nomor ... Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2025-2029;
- 37) Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Pasuruan;
- 38) Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 3 Tahun 2025 tentang SOTK Perangkat Daerah. (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2025, No Reg 99-2/2025); dan
- 39) Peraturan Bupati Pasuruan Nomor Tahun 2025 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan tahun 2025 – 2029 adalah sebagai berikut :

1.3.1 Maksud

Dokumen Rencana Strategis ini disusun dengan maksud menjadi panduan kerja bagi seluruh jajaran di dalam lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan. Dengan adanya Renstra ini, setiap lini tahu apa yang harus dilakukan, kapan harus dilakukan, dan indikator keberhasilannya. Ini memastikan semua pihak bergerak ke arah yang sama, menghindari tumpang tindih program, dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya

di Dinas Pendidikan selama tahun 2025 – 2029 sesuai dengan RPJMD Kabupaten Pasuruan tahun 2025 – 2029.

1.3.2 Tujuan

Renstra tidak hanya menjadi dokumen statis, tetapi juga berfungsi sebagai landasan dan acuan untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) tahunan. Setiap tahun, Renja akan menjabarkan program dan kegiatan yang lebih operasional dan spesifik, yang mana semuanya merujuk pada tujuan strategis yang sudah ditetapkan dalam Renstra yang menggambarkan visi misi serta prioritas pembangunan RPJMD Kabupaten Pasuruan periode 2025 – 2029 yang diampu oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan tahun 2025 – 2029.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
 - 2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah
 - 2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
 - 2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
 - 2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan
- 2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah
 - 2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah
 - 2.2.2 Isu Strategis

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

3.2 Strategi dan Arah Kebijakan

3.2.1 Strategi

3.2.2 Arah Kebijakan

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA

PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Program, Kegiatan dan Sub kegiatan

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

BAB V PENUTUP

LAMPIRAN

1. Pohon Kinerja
2. Cascading Kinerja
3. Meta Indikator IKU/IKK/Program/Kegiatan

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Layanan Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah menindaklanjuti dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Untuk melaksanakan amanat peraturan perundang-undangan tersebut Pemerintah Kabupaten Pasuruan menerbitkan Peraturan Bupati Nomor 191 Tahun 2023 pasal 2 ayat (1) Dinas adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan Kebudayaan, ayat (2) Dinas dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada bupati melalui sekretaris daerah. Sementara itu hasil dari kajian dalam pelaksanaan urusan di Bidang Kebudayaan yang selama ini melekat pada Dinas Pendidikan akan di pisah dan dikembalikan kewenangan urusannya kepada Perangkat Daerah yang berkaitan dan lebih banyak terlibat dalam tugas pokok dan fungsi yaitu dengan urusan Bidang Pariwisata. Kepala Dinas Pendidikan Memiliki tugas: *“Membantu Bupati dalam menyelenggarakan pembangunan di Bidang Pendidikan”*. Sedangkan untuk Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) saat ini dinyatakan bahwa susunan organisasi Dinas Pendidikan terdiri dari:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, membawahi:
 - 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
- c. Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal, membawahi:
 - 1. Seksi Kurikulum dan Penilaian;
 - 2. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana;
 - 3. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
- d. Bidang Pembinaan Sekolah Dasar, membawahi:
 - 1. Seksi Kurikulum dan Penilaian;
 - 2. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana;
 - 3. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
- e. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, membawahi:
 - 1. Seksi Kurikulum dan Penilaian;
 - 2. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana;
 - 3. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
- f. Bidang Pembinaan Ketenagaan, membawahi:
 - 1. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
 - 2. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

a. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Dinas

Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Tugasnya membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Pasuruan di bidang Pendidikan dan bidang Kebudayaan serta tugas pembantuan. Dinas

Pendidikan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang Pendidikan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang Pendidikan
- c. pelaksanaan administrasi dinas;
- d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

b. Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Dinas

Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengelola, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan penyusunan program dan pelaporan, administrasi umum, kepegawaian dan keuangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud diatas, sekretariat mempunyai fungsi :

- a. pengelolaan pelayanan administrasi umum;
- b. pengelolaan administrasi kepegawaian;
- c. pengelolaan administrasi keuangan;
- d. pengelolaan administrasi perlengkapan;
- e. pengelolaan aset dan barang milik negara/daerah;
- f. pengelolaan urusan rumah tangga, hubungan masyarakat, dan keprotokolan;
- g. pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran, dan perundang-undangan;
- h. pelaksanaan koordinasi penyelesaian masalah hukum (non yustisia) di bidang kepegawaian;
- i. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas bidang;
- j. pengelolaan kearsipan dan perpustakaan;
- k. pelaksanaan monitoring serta evaluasi organisasi dan tata laksana;

- l. pengkoordinasian pelaksanaan tugas-tugas bidang;
dan
- m. pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi Sekretariat dibantu oleh Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, berikut uraian tugas dari Sub Bagian Umum dan Kepegawaian:

- a. menyiapkan bahan pelaksanaan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat, penggandaan naskah dinas, kearsipan, dan perpustakaan;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan urusan rumah tangga dan keprotokolan;
- c. menyiapkan bahan pelaksanaan tugas urusan hubungan masyarakat;
- d. menyiapkan bahan penyusunan pengelolaan urusan kepegawaian;
- e. menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah;
- f. menyiapkan bahan pelaksanaan informasi dan publikasi;
- g. menyiapkan bahan penyelesaian masalah hukum (non yustisia) di bidang kepegawaian;
- h. menyiapkan bahan penyusunan evaluasi pengelolaan organisasi, ketatalaksanaan, dan penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-undangan
- i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

c. Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal

Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan

di bidang pembinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud diatas, Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal mempunyai fungsi :

- a. penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- b. pembinaan pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal;
- c. penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan nonformal
- d. penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- e. penyusunan bahan pembinaan kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- f. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- g. pelaporan dibidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;

- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- i. melaksanakan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal dibantu oleh Seksi Kurikulum dan Penilaian, berikut uraian tugas dari Seksi Kurikulum dan Penilaian :

- a. menyusun bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan kurikulum dan penilaian pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- b. menyusun bahan penetapan kurikulum muatan lokal dan kriteria penilaian pendidikan nonformal;
- c. menyusun bahan pembinaan pelaksanaan kurikulum dan penilaian pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- d. menyusun bahan pelaksanaan peningkatan mutu pembelajaran pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- e. menyusun bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kurikulum dan penilaian pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- f. melaporkan di bidang kurikulum dan penilaian pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal; dan
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Selain dibantu Seksi Kurikulum dan Penilaian, Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal dalam menjalankan tugas dan fungsi dibantu oleh Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana, berikut uraian tugas dari Seksi Kurikulum dan Penilaian :

- a. menyusun bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- b. menyusun bahan pembinaan kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan anak usia dini dan nonformal;
- c. menyusun bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- d. menyusun bahan penyelenggaraan pelayanan teknis bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- e. menyusun bahan pemantauan dan evaluasi kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- f. melaporkan di bidang kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal; dan
- g. melaksanakan tugas-tugas dan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

d. Tugas Pokok dan fungsi Bidang Pembinaan Sekolah Dasar

Bidang Pembinaan Sekolah Dasar, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan sekolah dasar.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud diatas, Bidang Pembinaan Sekolah Dasar mempunyai fungsi :

- a. penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta

- peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
- b. pembinaan pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar;
 - c. penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal sekolah dasar;
 - d. penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan sekolah dasar;
 - e. penyusunan bahan pembinaan kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar;
 - f. penyusunan bahan pembinaan bahasa dan sastra daerah yang penuturnya dalam daerah;
 - g. penyelenggaraan sekolah yang sehat, aman, nyaman dan berwawasan lingkungan;
 - h. penyusunan laporan hasil kinerja Bidang Pembinaan Sekolah Dasar sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas;
 - i. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar;
 - j. pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar;
 - k. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
 - l. melaksanakan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi Bidang Pembinaan Sekolah Dasar dibantu oleh Seksi Kurikulum

dan Penilaian, berikut uraian tugas dari Seksi Kurikulum dan Penilaian :

- a. menyusun bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan kurikulum dan penilaian sekolah dasar;
- b. menyusun bahan penetapan kurikulum muatan lokal dan kriteria penilaian sekolah dasar;
- c. menyusun bahan pembinaan pelaksanaan kurikulum dan penilaian sekolah dasar;
- d. menyusun bahan pembinaan bahasa dan sastra daerah yang penuturnya dalam daerah;
- e. menyusun bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kurikulum dan penilaian sekolah dasar;
- f. menyusun bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan peserta didik dan pendidikan karakter;
- g. melaporkan di bidang kurikulum dan penilaian sekolah dasar; dan
- h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang

Selain dibantu Seksi Kurikulum dan Penilaian, Bidang Pembinaan Sekolah Dasar dalam menjalankan tugas dan fungsi dibantu oleh Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana, berikut uraian tugas dari Seksi Kurikulum dan Penilaian :

- a. menyusun bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan kelembagaan, sarana dan prasarana sekolah dasar;
- b. menyusun bahan pembinaan kelembagaan, sarana dan prasarana sekolah dasar;
- c. menyusun bahan penerbitan izin pendirian, penataan dan penutupan sekolah dasar;
- d. menyusun bahan penyelenggaraan pelayanan teknis bidang pendidikan dasar;

- e. menyusun bahan pemantauan dan evaluasi kelembagaan, sarana dan prasarana sekolah dasar;
- f. melaporkan di bidang kelembagaan dan sarana prasarana sekolah dasar; dan
- g. melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Kepala Sekolah.

e. Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama

Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, mempunyai tugas penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan sekolah menengah pertama.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud diatas, Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama mempunyai fungsi :

- a. penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah menengah pertama;
- b. pembinaan pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah menengah pertama;
- c. penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal sekolah menengah pertama;
- d. penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan sekolah menengah pertama;
- e. penyusunan bahan pembinaan kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah menengah pertama;

- f. penyelenggaraan sekolah yang sehat, aman, nyaman dan berwawasan lingkungan;
- g. penyusunan laporan hasil kinerja Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas;
- h. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah menengah pertama;
- i. pelaporan kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah menengah pertama;
- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- k. melaksanakan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama dibantu oleh Seksi Kurikulum dan Penilaian, berikut uraian tugas dari Seksi Kurikulum dan Penilaian :

- a. menyusun bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan kurikulum dan penilaian sekolah menengah pertama;
- b. menyusun bahan penetapan kurikulum muatan lokal dan kriteria penilaian sekolah menengah pertama;
- c. menyusun bahan pembinaan pelaksanaan kurikulum dan penilaian sekolah menengah pertama;
- d. menyusun bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kurikulum dan penilaian sekolah menengah pertama;
- e. menyusun bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan peserta didik dan pendidikan karakter;
- f. melaporkan ke bidang kurikulum dan penilaian sekolah menengah pertama; dan

- g. melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Selain dibantu Seksi Kurikulum dan Penilaian, Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama dalam menjalankan tugas dan fungsi dibantu oleh Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana, berikut uraian tugas dari Seksi Kurikulum dan Penilaian :

- a. penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang kelembagaan dan sarana prasarana sekolah menengah pertama;
- b. penyusunan bahan pembinaan kelembagaan dan sarana prasarana sekolah menengah pertama;
- c. menyusun bahan penerbitan izin pendirian, penataan dan penutupan sekolah menengah pertama;
- d. menyusun bahan penyelenggaraan pelayanan teknis bidang sekolah menengah pertama;
- e. menyusun bahan pemantauan dan evaluasi kelembagaan, sarana dan prasarana sekolah menengah pertama;
- f. melaporkan di bidang kelembagaan dan sarana prasarana sekolah menengah pertama; dan
- g. melaksanakan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

f. Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Pembinaan Ketenagaan

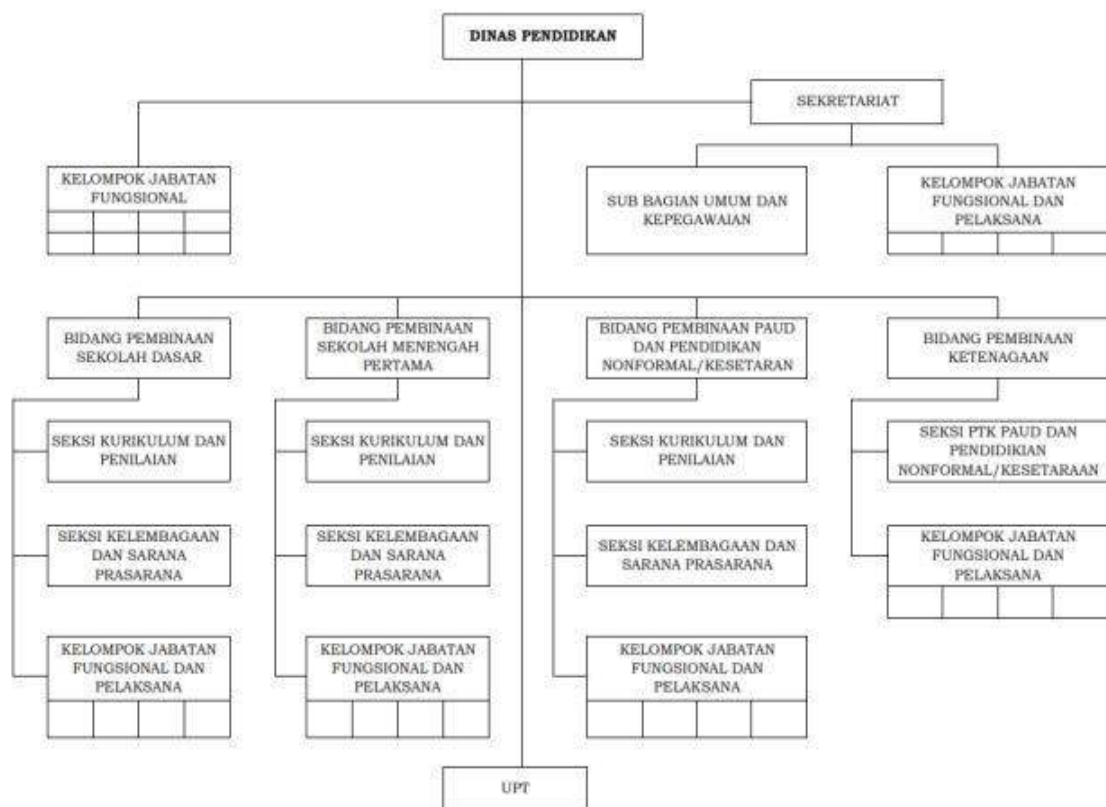
Bidang Pembinaan Ketenagaan, mempunyai tugas penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan nonformal..

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud diatas, Bidang Pembinaan Ketenagaan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama dan pendidikan nonformal;
- b. penyusunan bahan kebijakan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama dan pendidikan nonformal;
- c. penyusunan bahan rencana kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama dan pendidikan nonformal;
- d. penyusunan bahan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama dan pendidikan nonformal;
- e. penyusunan bahan rekomendasi pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan dalam daerah;
- f. penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama dan pendidikan nonformal;
- g. pelaporan pendidik dan tenaga pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama dan pendidikan nonformal
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi Bidang Pembinaan Ketenagaan dibantu oleh Seksi Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal, berikut uraian tugas dari Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal :

- a. menyusun bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- b. menyusun bahan rencana kebutuhan, rekomendasi pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- c. menyusun bahan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- d. menyusun bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- e. melaporkan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal; dan
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Bidang.



Gambar 2.1.1
Struktur Organisasi dan Tata Kerja
Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan

2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Untuk mendukung tugas pokok dan fungsi, Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan didukung oleh sumber daya aparatur sipil negara yang memiliki kualifikasi dan kompetensi yang cukup dan didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai meskipun masih perlu peningkatan.

A. Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan jika dilihat dari status kepegawaian sebagai berikut :

Tabel 2.1.2.A. 1 Rekapitulasi Jumlah Pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan Berdasarkan Jabatan dan Status Kepegawaian

NAMA JABATAN	STATUS KEPEGAWAIAN			
	PNS	PPPK	Paruh Waktu	Total
Kepala Dinas	1			1
Sekretaris Dinas	1			1
Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan	1			1
Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan PNF	1			1
Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar	1			1
Kepala Bidang Kebudayaan	1			1
Analisis SDM Aparatur Ahli Muda	1			1
Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar	1			1
Kepala Seksi Tenaga Kebudayaan	1			1
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	1			1
Pamong Budaya Ahli Muda	1			1
Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Muda	1			1
Operator Layanan Operasional		17	2	19
Penata Layanan Operasional		18	3	21
Penelaah teknis kebijakan	8			8
Pengadministrasi Perkantoran	25	18	1	44
Pengolah Data dan Informasi	11			11
Total	56	53	6	115

Sumber : Dinas Pendidikan, 2025

Jumlah pegawai di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan jika dilihat dari Jenjang Pendidikan, Unit Kerja, dan Status Kepegawaian sebagai berikut :

Tabel 2.1.2.A. 2 Rekapitulasi Jumlah Pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan Berdasarkan Jenjang Pendidikan dan Status Kepegawaian

JENJANG PENDIDIKAN	STATUS	TOTAL
DIPLOMA III / SEDERAJAT	PNS	1
S-1 / SEDERAJAT	PPPK Paruh Waktu	3
	PNS	28
	PPPK	20
S-2 / SEDERAJAT	PNS	8
SLTA/ SEDERAJAT	PPPK Paruh Waktu	3
	PNS	19
	PPPK	33
TOTAL		115

Sumber : Dinas Pendidikan, 2025

B. Sarana dan Prasarana

Aset atau modal yang dimiliki oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan berbentuk sarana dan prasarana berupa tanah, peralatan dan mesin, Gedung dan bangunan, jalan jaringan dan irigasi, asset tetap lainnya, asset tidak terwujud dan asset lain-lain. Jumlah aset seperti pada table berikut :

Tabel 2.1.2.B Rekapitulasi Nilai Asset Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan

KODE	URAIAN	JUMLAH	NILAI (Rp.)
01.03.01	TANAH	1	59.393.224,00
01.03.02	PERALATAN DAN MESIN	16.367	33.796.833.284,03
01.03.03	GEDUNG DAN BANGUNAN	5	23.281.416.535,00
01.03.04	JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI	1	9.550.000,00
01.03.05	ASET TETAP LAINNYA	482.180	12.677.277.816,98
01.05.03	ASET TIDAK BERWUJUD	2	293.850.000,00
01.05.04	ASET LAIN-LAIN	109	392.727.164,00
TOTAL			70.511.048.024,01

Sumber : Dinas Pendidikan, Tahun 2025

Satuan Pendidikan yang dibawah kewenangan Dinas Pendidikan juga merupakan selain sebagai sarana dan prasarana dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam bidang Pendidikan, juga sebagai sasaran pelayanan. Adapun jumlah satuan Pendidikan di Kabupaten Pasuruan Adalah :

Tabel 2.1.2.C
Jumlah Satuan Pendidikan Menurut Bentuk
Dan status di Kabupaten Pasuruan

Jenjang	Bentuk Satuan Pendidikan	Negeri	Swasta	Total
PAUD	KB		494	494
	SPS		147	147
	TK	4	689	693
	TPA		9	9
SD	SD	649	72	721
SMP	SMP	63	104	167
Kesetaraan	PKBM		26	26
Total		716	1541	2257

Sumber : Dapodikdasmen ; 2025

Selain itu kebutuhan Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada satuan Pendidikan dibawah naungan pemerintah daerah juga menjadi salah satu

permasalahan yang akan menjadi fokus dalam 5 (lima) tahun mendatang, mengingat setiap tahun bagi ASN juga ada Batas Usia Pensiun (BUP) yang menjadikan kebutuhan ASN akan berkurang selain latar belakang meninggal atau mutasi jabatan, lintas perangkat daerah atau lintas pemerintah daerah.

Adapun data ASN dan proyeksi kebutuhan berdasarkan BUP ASN dan jabatan ASN dalam 5 tahun mendatang sebanyak 3.631 orang ASN dengan rincian bisa dilihat dalam table berikut :

Tabel 2.1.2.D
Kebutuhan ASN Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan
Tahun 2026 – 2030

NO	JABATAN ASN	2026	2027	2028	2029	2030
Kebutuhan ASN TK						
1	Kepala Sekolah	-1	-1	-1	-1	-2
2	Guru Kelas	-6	-7	-7	-8	-10
	Perhitungan Pendidik	-7	-8	-8	-9	-12
3	Operator Layanan Operasional	-4	-4	-4	-4	-4
4	Pengadministrasi Perkantoran	1	1	1	1	1
5	Pengelola Umum Operasional	-4	-4	-4	-4	-4
	Perhitungan Tenaga Kependidikan	-7	-7	-7	-7	-7
	Sub Total	-14	-15	-15	-16	-19
Kebutuhan ASN SD						
1	Kepala Sekolah	-103	-135	-173	-213	-249
2	Guru Pendidikan Agama Islam	-141	-146	-154	-165	-176
3	Guru Kelas	-523	-604	-693	-782	-859
4	Guru Penjaskes	-141	-146	-156	-173	-185
	Perhitungan Pendidik	-907	-1.030	-1.175	-1.332	-1.468
5	Operator Layanan Operasional	-603	-603	-603	-603	-603
6	Pengadministrasi Perkantoran	289	275	261	247	227
7	Pengelola Umum Operasional	-771	-771	-771	-771	-771
	Perhitungan Tenaga Kependidikan	-1.085	-1.099	-1.113	-1.127	-1.147
	Sub Total	-1.992	-2.129	-2.288	-2.459	-2.615
Kebutuhan ASN SMP						
1	Kepala Sekolah	-28	-32	-38	-45	-50
2	Pendidikan Agama Islam	-24	-26	-31	-34	-38
3	PKn	-24	-31	-33	-37	-38

NO	JABATAN ASN	2026	2027	2028	2029	2030
4	Bahasa Indonesia	-30	-38	-45	-53	-64
5	Seni Budaya	-71	-71	-73	-73	-74
6	Penjaskes	-31	-34	-38	-42	-44
7	Bahasa Inggris	-7	-21	-31	-39	-51
8	Matematika	-51	-59	-69	-82	-93
9	IPA	-26	-39	-53	-71	-82
10	IPS	-6	-13	-16	-25	-30
11	Prakarya	-21	-21	-22	-27	-29
12	TIK	18	18	18	17	17
13	Bahasa Daerah	-77	-78	-78	-79	-80
14	BK	-88	-90	-91	-93	-93
	Perhitungan Pendidik	-466	-535	-600	-683	-749
15	Penata Layanan Operasional	-63	-63	-63	-63	-63
16	Pengelola Layanan Operasional	-63	-63	-63	-63	-63
17	Operator Layanan Operasional	-232	-232	-232	-232	-232
18	Pengadministrasi Perkantoran	323	312	301	296	282
19	Pengelola Umum Operasional	-158	-158	-158	-158	-158
	Perhitungan Tenaga Kependidikan	-194	-205	-216	-221	-235
	Sub Total	-660	-740	-816	-904	-984
Kebutuhan ASN Guru Agama						
1	Pendidikan Agama Hindu	-7	-9	-9	-10	-10
2	Pendidikan Agama Budha	-1	-1	-1	-1	-1
3	Pendidikan Agama Kristen	0	0	0	0	-1
4	Pendidikan Agama Katholik	-1	-1	-1	-1	-1
	Sub Total	-9	-11	-11	-12	-13
1	Pendidik	-1.390	-1.585	-1.795	-2.037	-2.243
2	Tenaga Kependidikan	-1.285	-1.310	-1.335	-1.354	-1.388
TOTAL		-2.675	-2.895	-3.130	-3.391	-3.631

2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan yang diatur dalam Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 191 Tahun 2023 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan, maka Dinas Pendidikan.

Kinerja pelayanan Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan diukur dari pencapaian indikator kinerja utama (IKU) yang tertuang dalam dokumen Renstra Pendidikan

Kabupaten Pasuruan tahun 2020-2024 dan dokumen Perubahan Renstra Kabupaten Pasuruan tahun 2020-2024. Pada kedua dokumen tersebut IKU Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan berbeda antara tahun 2020-2024, sebagaimana dijabarkan berikut ini :

Tabel 2.1.3

Kondisi Capaian Kinerja 5 (lima) Tahun Terakhir

NO	Indikator Kinerja Renstra 2025-2029	Standar NSPK	Kondisi				
			2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Indeks Pendidkan	IKU	0,59	0,592	0,602	0,603	0,604
2	Harapan lama sekolah	IKU	12,41	12,58	12,76	12,77	12,78
3	Rata-rata lama sekolah	IKU	7,40	7,41	7,42	7,44	7,46
4	Nilai SAKIP PD -	IKU	80,05	80,98	82,14	83,65	83,95
5	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	IKK			89,20	85,89	83,97
6	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	IKK			93,82	91,79	98,75
7	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	IKK			83,97	77,37	82,49
8	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah dalam pendidikan kesetaraan	IKK			12,32	58,39	57,32
9	Rata-rata Kemampuan Literasi SD	SPM		1,83	55,73	77,36	63,45
10	Rata-rata Kemampuan Numerasi SD	SPM		1,71	43,93	71,31	57,01
11	Rata-rata Kemampuan Literasi SMP	SPM		1,81	63,56	75,32	71,02
12	Rata-rata Kemampuan Numerasi SMP	SPM		1,79	54,6	72,09	63,64
13	Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B	SPM		63,67	74,59	75,91	76,01

NO	Indikator Kinerja Renstra 2025-2029	Standar NSPK	Kondisi				
			2020	2021	2022	2023	2024
14	Pertumbuhan Proporsi Guru PAUD Formal dengan kualifikasi S1/D IV	SPM		68,33	69,74	76,63	76,63
15	Iklim Kebhinekaan SD	SPM			87,87	73,52	72,24
16	Iklim Inklusivitas SD	SPM			76,60	55,75	59,39
17	Iklim Keamanan SD	SPM			84,93	73,32	75,43
18	Iklim Keamanan SMP	SPM			80,42	68,69	69,48
19	Iklim Kebinekaan SMP	SPM			80,12	72,05	69,93
20	Iklim Inklusivitas SMP	SPM			74,30	55,29	56,91
21	Angka Partisipasi Murni SD/MI	Indikator Kinerja Lainnya	91,64	93,81	94,24	95,13	95,16
22	Angka Partisipasi Murni SMP/MTs	Indikator Kinerja Lainnya	76,32	84,47	84,43	85,19	82,88
23	APK PAUD	Indikator Kinerja Lainnya		91,74	91,48	95,8	90,75
24	Angka Kelulusan Warga Belajar	Indikator Kinerja Lainnya			3000	2209	2117
25	Prosentase pemenuhan kebutuhan PTK di semua jenjang pendidikan	Indikator Kinerja Lainnya					

Hasil capaian kinerja 5 (lima) tahun terakhir untuk Indikator Kinerja Utama (IKU), Indikator Kinerja Daerah (IKD), Indikator Kinerja Kunci (IKK), Indikator Kinerja SPM dan indicator kinerja lainnya secara umum mengalami peningkatan dari tahun 2020 – 2024. Namun bervariasi untuk peningkatan capaiannya ada yang signifikan ada yang meningkat tipis. Ada juga beberapa capaian menurun pada tahun 2024 daripada tahun sebelumnya. Hal ini akan menjadi evaluasi pada pelaksanaan program terkait dengan indikator – indikator tersebut agar lebih menjadi perhatian untuk perbaikan layanan baik dalam sisi perencanaan berbasis data, prioritas penganggaran maupun prioritas kegiatan konkretnya.

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan

Secara umum, layanan Pendidikan ditujukan untuk meningkatkan Tingkat Pendidikan bagi masyarakat, dengan mempertimbangkan kebutuhan individu dan karakteristik masing-masing baik di jenjang Pendidikan anak usia dini, Pendidikan dasar, dan Pendidikan nonformal/kesetaraan. Sasaran layanan Pendidikan meliputi berbagai pihak yang mendapatkan manfaat dari proses Pendidikan antara lain peserta didik, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, orang tua, masyarakat dan pemerintah.

1. Peserta Didik :

Sebagai penerima layanan pendidikan utama, peserta didik membutuhkan layanan yang berkualitas dalam mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian melalui terciptanya Pelajar Pancasila.

2. Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan:

Tenaga Pendidik dan tenaga kependidikan membutuhkan dukungan untuk meningkatkan kualitas pengajaran, termasuk pelatihan, pengembangan kurikulum, dan sumber daya yang memadai.

3. Orang Tua/Wali:

Orang tua memiliki peran penting dalam mendukung pendidikan anak-anak mereka. Pelayanan yang dibutuhkan meliputi informasi tentang perkembangan anak, konsultasi, dan kolaborasi dalam proses belajar-mengajar.

4. Masyarakat:

Masyarakat berperan sebagai lingkungan yang mendukung pendidikan, sehingga perlu terlibat dalam kegiatan sekolah, seperti sosialisasi, kegiatan ekstrakurikuler, dan pengembangan potensi anak-anak di lingkungan sekitar.

5. Pemerintah:

Pemerintah memiliki peran dalam memberikan regulasi, anggaran, dan dukungan kebijakan untuk memastikan kualitas pendidikan yang baik serta kolaborasi lintas sektor berdasarkan data statistik dan capaian bidang Pendidikan.

Dalam proses memberikan layanan Pendidikan perlu mempertimbangkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagai prioritas utama dalam pelayanan wajib dasar untuk urusan pendidikan, yang bertujuan untuk memberikan panduan kepada pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Pendidikan dalam memenuhi kewajiban sesuai dengan jenjang dan jalur Pendidikan. Selain itu SPM juga bertujuan untuk menjamin hak konstitusional masyarakat dan pemerataan layanan pendidikan diseluruh wilayah Kabupaten Pasuruan.

Selain itu dalam melaksanakan program kegiatan sesuai dengan prioritas layanan yaitu mengacu pada petunjuk teknis pelaksanaan SPM Pendidikan sesuai Permendikbudristek No. 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan, untuk penerima layanan Pendidikan yang utama adalah peserta didik, dalam hal ini jumlah peserta didik yang menerima layanan Pendidikan selain mutu dari layanan tersebut adalah jumlah warga negara yang akan dilayani dalam hal ini adalah peserta didik aktif dan terdaftar pada satuan Pendidikan yang dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 2.1.4
Jumlah Peserta Didik pada Satuan Pendidikan di
Kabupaten Pasuruan

Jenjang Pendidikan	Bentuk Pendidikan	Status		Total
		Negeri	Swasta	
PAUD	KB		4.108	7.979
	SPS		1.446	2.808

Jenjang Pendidikan	Bentuk Pendidikan	Status		Total
		Negeri	Swasta	
	TK	302	15.565	30.242
	TPA		87	182
SD	SD	107.419	6.599	119.914
SMP	SMP	31.166	7.365	44.696
Kesetaraan	PKBM		4.645	8.613
Total		138.887	39.815	214.434

Sumber : Dapodikdasmen ; 2025

Tabel diatas merupakan sasaran penerima layanan sesuai dengan Standa Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan sebagaimana diamanatkan pada peraturan dan perundangan – undangan yang berlaku. Data tersebut bersifat dinamis dan sesuai dari hasil isian dari satuan Pendidikan pada aplikasi Dapodikdasmen.

Untuk mutu layanan sesuai SPM Pendidikan Adalah mengacu pada 15 indikator yang telah tercantum dalam IKK dan Indikator SPM Pendidikan lainnya seperti telah disebutkan pada tabel indicator kinerja sebelumnya.

2.1.2 Mitra Perangkat Daerah dalam pemberian pelayanan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta wewenang Dinas Pendidikan dalam melayani Masyarakat bekerjasama dengan perangkat daerah lain. Dalam hal ini yaitu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPT-SP) Kabupaten Pasuruan, terutama dalam memberikan layanan permohonan baru dan perpanjangan Ijin Operasional (IJOP) bagi satuan Pendidikan swasta di wilayah Kabupaten Pasuruan.

2.1.3 Dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja

Dalam pelayanan Masyarakat di bidang Pendidikan, Dinas Pendidikan belum bekerjasama dengan BUMD Kabupaten Pasuruan, dan belum ada perencanaan dalam waktu 5 (lima) tahun mendatang.

2.1.4 Kerjasama daerah yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah

Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan belum ada Kerjasama dengan daerah yang lain.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Darah

Isu-isu strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan merupakan hal yang harus diperhatikan dan dikedepankan, dengan maksud untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Pasuruan dalam perencanaan ke depan. Sebagai upaya untuk menentukan isu-isu strategis, maka dimulai dengan melalui identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan di Kabupaten Pasuruan. Berdasarkan gambaran pelayanan Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan serta tantangan dan peluang dalam mencapai target dalam tiga tahun perencanaan, berikut dijabarkan identifikasi permasalahan Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan :

Tabel 2.2.1

**Pemetaan Permasalahan Dinas Pendidikan
Kabupaten Pasuruan**

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat	• Rendahnya partisipasi Pendidikan Masyarakat • Aksesibilitas Pendidikan belum merata	• Daya tampung satuan Pendidikan belum merata • Kualitas sarana dan prasarana Pendidikan masih rendah • Angka anak tidak sekolah (ATS) masih tinggi
2	Rendahnya kualitas pendidikan	Rendahnya capaian Kompetensi literasi dan numerasi jenjang SD dan SMP.	• Kualitas sumber daya pada masing-masing satuan pendidikan belum merata terutama antara swasta dan negeri. • Kurikulum pendidikan karakter belum termuat

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			di kurikulum pendidikan Kabupaten Pasuruan • Kurang maksimalnya pengembangan dan pelaksanaan kurikulum pembelajaran. • Belum maksimalnya perencanaan berbasis data pada satuan Pendidikan • Kualifikasi tenaga pendidik masih belum terpenuhi terutama jenjang PAUD.
3	Kurangnya tenaga pendidik	• Kurangnya Tenaga pendidik pada satuan Pendidikan negeri	• Sebagian tenaga pendidik ASN masih status DPk (dipekerjakan) pada satuan Pendidikan swasta • kurangnya tenaga pendidik ASN karena Sebagian memasuki Batas usia pensiun (BUP).

Dari pemetaan permasalahan tersebut diatas, dapat ditarik untuk tujuan dan sasaran Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan dalam masa perencanaan strategis 5 (lima) tahun yang akan datang sebagai berikut :

Tabel 2.2.2
Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis
Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan Tahun 2025-2029

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
1	Meningkatnya Tingkat Pendidikan Masyarakat	- Rata-rata Lama Sekolah - Harapan Lama Sekolah	1. Meningkatnya partisipasi pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD
				Tingkat partisipasi warga negara usia

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
				7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar
				Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama
			2. Meningkatnya Kualitas pendidikan	Rata-rata Kemampuan Literasi SD
				Rata-rata Kemampuan Numerasi SD
				Rata-rata Kemampuan Literasi SMP
				Rata-rata Kemampuan Numerasi SMP
			3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP PD

Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai dengan berdasarkan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan pada tahun 2025 – 2029 yaitu Harapan lama sekolah (HLS) dan Rata-rata lama sekolah (RLS) yaitu bagaimana Tingkat Pendidikan Masyarakat di Kabupaten Pasuruan meningkat. Hal ini nantinya bisa diukur melalui 2 indikator kinerja utama tersebut. Demikian juga untuk sasaran rencana strategis juga didasarkan atas *critical success factor (CSF)* yang sudah di susun dalam rangkaian pohon kinerja untuk 5 tahun yang akan datang sebagaimana tampilan table tersebut diatas.

2.2.2 Isu Strategis

A. Isu strategis Nasional

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan wajib dasar urusan Pendidikan, ada beberapa isu strategis nasional yang memang diangkat dan menjadi perhatian lebih terutama bagi stakeholder bidang Pendidikan sendiri maupun lintas sektor. Dengan mengusung tema “Partisipasi Semesta Wujudkan Pendidikan Bermutu untuk Semua” merupakan tag yang jelas bahwasanya Pendidikan merupakan tanggungjawab seluruh pihak dalam mewujudkan dan memajukannya.

Beberapa isu strategis nasional yang diambil dari Peta Jalan Pendidikan 2025 – 2045 yaitu :

Tabel 2.2.1.A
Isu Strategis Nasional Pendidikan

No	Isu Strategis Nasional
1	Rendahnya akses dan partisipasi pendidikan anak usia dini (PAUD)
2	Kesenjangan partisipasi pendidikan terutama jenjang pendidikan menengah
3	Masih maraknya masalah-masalah sosial yang menghambat anak untuk berpartisipasi dalam pendidikan secara berkualitas
4	Dukungan infrastruktur dan bantuan pendidikan belum optimal
5	Belum optimalnya jalur pendidikan nonformal sebagai alternatif pembelajaran
6	Masih rendahnya partisipasi masyarakat ke jenjang pendidikan tinggi berkualitas
7	Belum meratanya kapasitas dan kualitas infrastruktur esensial pendidikan tinggi
8	Belum berkembangnya pembelajaran STEAM dan perlunya proporsionalitas bidang ilmu STEAM di perguruan tinggi

No	Isu Strategis Nasional
9	Masih belum meratanya kualitas dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan perguruan tinggi
10	Belum optimalnya kualitas pembelajaran dan penjaminan mutu pendidikan tinggi
11	Capaian peserta didik pada kompetensi esensial dan kualitas pembelajaran yang belum optimal
12	Perlunya koordinasi lebih sistematis dalam menjaga tumbuh kembang anak usia dini agar optimal
13	Iklim lingkungan belajar yang belum sepenuhnya mendukung kesejahteraan psikologis warga satuan pendidikan
14	Perlunya penguatan layanan pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan
15	Masih lemahnya rekognisi pendidik dan lulusan pendidikan pesantren
16	Perlunya peningkatan penjaminan mutu layanan pada pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan
17	Pendidikan vokasi yang belum sepenuhnya selaras dengan kebutuhan industri
18	Pendidik dan tenaga kependidikan vokasi yang kurang produktif
19	Belum optimalnya penciptaan dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi di pendidikan tinggi berbasis riset ilmiah (dasar dan terapan)
20	Belum optimalnya peran perguruan tinggi sebagai pengembangan ilmiah dan produksi pengetahuan
21	Distribusi guru yang belum merata dan penguatan mekanisme rekrutmen
22	Penyelenggaraan pendidikan calon guru melalui Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) dan Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) belum sepenuhnya optimal

No	Isu Strategis Nasional
23	Pengembangan profesional pendidik belum efektif dan berkelanjutan
24	Kurangnya kapasitas kepala satuan pendidikan sebagai pemimpin pembelajaran
25	Disparitas kebijakan pemimpin daerah dalam menentukan prioritas kebijakan
26	Perlunya peningkatan kualitas tata kelola pendidikan di pusat dan daerah

Sumber : Peta Jalan Pendidikan 2025 – 2045, Bappenas, Kemendikbudristek, Kemenag, 2024

Dari isu strategis nasional diatas, ada beberapa isu yang selaras dengan isu yang terjadi di daerah, terutama isu strategis dengan kewenangan tugas fungsi Pendidikan jenjang PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan.

Beberapa isu strategis nasional yang selaras tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut :

a. *Tingkat partisipasi dan aksesibilitas Pendidikan masih belum maksimal, terutama pada PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan;*

Tingkat partisipasi Pendidikan di jenjang kewenangan Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan dalam hal ini PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan masih ada kesenjangan. Terutama di PAUD dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang masih tergolong rendah. Hal ini juga dikarenakan masih tingginya angka anak tidak sekolah (ATS) di Kabupaten Pasuruan .

b. *Capaian peserta didik dan kualitas pembelajaran belum optimal;*

Salah satu isu strategis nasional yang terkait di Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan Dimana kualitas Pendidikan dasar dapat dilihat dari capaian rata – rata kompetensi literasi dan numerasi jenjang SD dan SMP berdasarkan hasil asesmen nasional masih dalam kategori sedang.

c. *Distribusi guru yang belum merata;*

Pemerataan kebutuhan dan distribusi guru di Lembaga negeri masih belum merata, hal ini disebabkan karena terkait dengan daya tampung peserta didik pada satuan Pendidikan yang berkembang dan proses pemetaan kebutuhan guru yang dinamis berdasarkan kebutuhan dan perkembangan batas usia pension guru ASN.

d. *Pengembangan professional pendidik belum efektif dan berkelanjutan;*

Profesionalitas pendidik selalu menjadi tuntutan utama dalam pelayanan di masyarakat sebagai sasaran utama. Pemenuhan kualifikasi minimal pendidik sesuai dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Guru dan Dosen bagi yang belum memenuhi kualifikasi terutama pendidik pada satuan Pendidikan PAUD juga menjadi salah satu fokus utama di Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan. Selain itu peningkatan kualifikasi ke jenjang Pendidikan lebih tinggi juga diharapkan berkembang seiring dengan pemenuhan kualifikasi minimum pendidik. Demikian juga untuk pendidik yang bersertifikasi juga masih belum seluruhnya. Dukungan Kemendikdasmen dalam percepatan Program Profesi Guru (PPG) bagi pendidik yang belum

bersertifikasi menjadi satu hal yang positif bagi perkembangan profesionalisme pendidik di Kabupaten Pasuruan

e. *Perlunya koordinasi lebih sistematis dalam menjaga tumbuh kembang anak usia dini agar optimal.*

Kualitas layanan untuk jenjang PAUD juga dikarenakan masih belum maksimalnya penyediaan layanan untuk pelayanan dan pengembangan PAUD HI (Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif) yang merupakan hal baru bagi pelaksanaan pendidikan anak usia dini di Kabupaten Pasuruan dimana juga menjadi salah satu isu utama nasional karena terkait juga dengan wajib belajar 13 tahun yaitu 1 tahun Pendidikan prasekolah dan 12 tahun Pendidikan dasar.

f. *Perlunya peningkatan kualitas tata kelola pendidikan di pusat dan daerah*

Rapor Pendidikan daerah juga salah satu instrument dalam menghadapi isu strategis nasional dalam rangka meningkatkan tata Kelola Pendidikan terutama dalam hal perencanaan berbasis data agar tercapai tujuan dari satuan Pendidikan dan perangkat daerah. Dari beberapa isu terkait tersebut diatas semuanya sangat selaras dengan tujuan yang akan dicapai oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan dalam masa 5 tahun yang akan datang.

B. Isu strategis Regional

Analisis isu-isu strategis di provinsi Jawa Timur juga menjadi salah satu bahan pembahasan isu dan keselarasan penyusunan perencanaan di Tingkat regional dan daerah.

Isu strategis bidang Pendidikan di wilayah provinsi Jawa Timur antara lain :

a. Masih terbatasnya perkembangan sumber daya manusia di beberapa Kabupaten/Kota.

Perkembangan sumber daya manusia di beberapa wilayah di provinsi Jawa Timur termasuk di Kabupaten Pasuruan masih belum meningkat secara signifikan. Hal ini dapat ditunjukkan dengan hasil capaian indikator harapan lama sekolah (HLS) dan rata-rata lama sekolah (RLS) di Kabupaten Pasuruan dan Provinsi Jawa Timur. Hal ini disebabkan karena belum meratanya akses masyarakat terhadap layanan dasar terutama urusan Pendidikan.

Tabel 2.2.1.B
Perbandingan Capaian Rata Lama Sekolah
dan Harapan Lama Sekolah
Kabupaten Pasuruan dengan Provinsi Jawa Timur
Tahun 2020 – 2024

No	Indikator	Kabupaten Pasuruan					Provinsi Jawa Timur				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	Rata Lama Sekolah	7,4	7,41	7,42	7,44	7,46	7,78	7,88	8,03	8,11	8,28
2	Harapan Lama Sekolah	12,41	12,58	12,76	12,77	12,78	13,19	13,36	13,37	13,38	13,43

Sumber : BPS, Tahun 2025

b. Wajib belajar 13 tahun.

Selain itu wajib belajar 13 tahun yang merupakan program nasional juga dituangkan dalam isu strategis di wilayah Provinsi Jawa Timur guna keselarasan dokumen perencanaan. Wajib belajar 1 tahun di Pendidikan prasekolah dan 12 tahun di Pendidikan dasar juga menjadi perhatian utama dalam urusan Pendidikan di provinsi Jawa Timur.

c. Anak tidak sekolah (ATS)

Anak tidak sekolah (ATS) di provinsi Jawa Timur dan di daerah lainnya tetap menjadi salah satu *concern* dalam perencanaan pembangunan daerah di bidang Pendidikan. Penanganan ATS diperlukan Kerjasama lintas sektor dan memungkinkan juga lintas daerah Kabupaten / Kota. Penanganan ATS yang tepat juga akan berimplikasi pada peningkatan partisipasi Pendidikan dan berdampak pada peningkatan Tingkat Pendidikan Masyarakat juga.

C. Isu strategis daerah

Berdasarkan hasil capaian tabel diatas, maka Rata Lama Sekolah mengalami kenaikan yang sangat rendah daripada indikator – indikator sasaran Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan lainnya yaitu mengalami peningkatan hanya 0,01 poin setiap tahunnya sejak tahun 2020 – 2022 yang mencerminkan bagaimana perkembangan Pendidikan di Kabupaten Pasuruan yang cenderung stagnan karena mengalami perkembangan capaian belum signifikan.

Begitu juga peningkatan capaian dari tahun 2023 ke tahun 2024 untuk RLS hanya meningkat 0,02 poin dan HLS juga hanya meningkat tipis yaitu 0,01 poin. Harapan lama sekolah Kabupaten Pasuruan juga masih dibawah capaian Provinsi Jawa Timur, sehingga masih membutuhkan upaya untuk meningkatkan capaian tersebut pada periode perencanaan mendatang.

Maka dari data tersebut di perencanaan strategis periode berikutnya mendapat perhatian serius dan menjadi prioritas utama Dinas Pendidikan dalam rangka mendongkrak peningkatan angka Rata Lama Sekolah

terutama melalui program – program prioritas Pembangunan daerah yang sudah digagas oleh Bupati Pasuruan.

Isu strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan dapat berasal dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan di dalam periode perencanaan yang mendatang. Berdasarkan analisis capaian tersebut diatas maka isu-isu strategis Dinas Pendidikan adalah sebagai berikut:

1. Tingkat Pendidikan Masyarakat masih belum naik secara signifikan.

Dengan ditunjukkannya capaian Rata Lama Sekolah (RLS) dan harapan lama sekolah (HLS) yang masih cenderung rendah secara umu dapat di simpulkan bahwasanya Tingkat Pendidikan masyarakat kabupaten hanya sebatas pada capaian rata – rata lama sekolah saat ini. Hal tersebut masih jauh dibandingkan dengan beberapa daerah terutama di provinsi Jawa Timur.

2. Tingkat partisipasi Pendidikan masih belum maksimal.

Tingkat partisipasi Pendidikan merupakan ukuran sejauh mana banyaknya warga negara usia sekolah yang sudah mengenyam pendidikan sesuai dengan usia sekolah baik pada Pendidikan formal maupun Pendidikan nonformal.

3. Anak tidak sekolah di kabupaten pasuruan masih cukup tinggi;

Anak Tidak Sekolah (ATS) di Kabupaten Pasuruan masih cukup tinggi, dimana ATS tersebut di dapat dari data anak Belum Pernah Bersekolah (BPB), Dropout (DO), dan Lulus tidak melanjutkan (LTM) yang di dapat dari integrasi data Dapodik dari Kemendikdasmen, data Emis dari Kementerian Agama dan PD Dikti dengan

ditampilkan pada web Dashboard ATS
Kemendikdasmen.

Tabel 2.2.1.C
Rekapitulasi Jumlah Anak Tidak Sekolah
Kabupaten Pasuruan Tahun 2025

No	Kecamatan	Jumlah BPB	Jumlah Drop out	Jumlah Lulus Tidak Melanjutkan	Total
1	Kec. Purwodadi	196	151	170	517
2	Kec. Tuttur	207	284	180	671
3	Kec. Puspo	172	338	248	758
4	Kec. Tosari	80	69	164	313
5	Kec. Lumbang	239	215	495	949
6	Kec. Pasrepan	446	560	468	1.474
7	Kec. Kejayan	370	449	572	1.391
8	Kec. Wonorejo	350	265	530	1.145
9	Kec. Purwosari	189	211	149	549
10	Kec. Prigen	188	190	137	515
11	Kec. Sukorejo	291	230	276	797
12	Kec. Pandaan	211	194	98	503
13	Kec. Gempol	293	272	154	719
14	Kec. Beji	194	144	96	434
15	Kec. Bangil	218	396	192	806
16	Kec. Rembang	340	481	243	1.064
17	Kec. Kraton	507	899	1.253	2.659
18	Kec. Pohjentrek	115	118	173	406
19	Kec. Gondang Wetan	168	323	257	748
20	Kec. Rejoso	138	172	119	429
21	Kec. Winongan	177	234	290	701
22	Kec. Grati	271	325	426	1.022
23	Kec. Lekok	656	284	822	1.762
24	Kec. Nguling	316	333	461	1.110
	TOTAL	6.332	7.137	7.973	21.442

Sumber : Kemendikdasmen, September 2025

4. Pemerataan aksesibilitas Pendidikan belum maksimal;
Tingkat Pendidikan Masyarakat di Kabupaten Pasuruan yang masih cenderung rendah juga dikarenakan aksesibilitas Pendidikan di beberapa wilayah di Kabupaten Pasuruan belum merata. Hal ini juga disebabkan karena daya tampung dan sarana prasarana

Pendidikan ada yang masih belum terpenuhi secara layak dan sesuai standar nasional Pendidikan.

5. Pemenuhan dan distribusi guru belum merata.
- Pemenuhan dan distribusi guru di beberapa satuan Pendidikan negeri belum merata. Hal ini juga disebabkan karena perubahan daya tampung peserta didik dan juga guru yang memasuki batas usia pensiun tidak seimbang dengan jumlah formasi guru baru. Sehingga di beberapa satuan Pendidikan ada guru yang melebihi beban kerja daripada yang seharusnya diwajibkan sesuai dengan beban kerja guru berdasarkan regulasi Permendikbud.

Selain itu isu KLHS yang terkait dengan isu strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan juga bisa dilihat pada table berikut :

Tabel 2.2
Permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah

Potensi Daerah yang menjadi kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
pengelolaan pendidikan anak usia dini, pendidikan nonformal/ke setaraan, pendidikan sekolah dasar, dan pendidikan sekolah menengah pertama.	Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat	Belum meningkatnya kualitas peserta didik di bidang pendidikan	Sustainable Development Goals (SDGs)	Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Pengembangan sumber daya manusia berkualitas melalui peningkatan akses pendidikan, kesehatan dan standar hidup yang layak dan berkualitas	1. Tingkat partisipasi Pendidikan Pendidikan belum optimal 2. Masih tingginya anak tidak sekolah (ATS) 3. Aksesibilitas pendidikan belum merata 4. pemenuhan dan distribusi guru belum merata

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 – 2029 maka Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan mendukung untuk tujuan rencana pembangunan daerah Kabupaten Pasuruan tahun 2025 – 2029 yang telah ditetapkan, maka tujuan dan sasaran yang dirumuskan dalam Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan tahun 2025 – 2029 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR -SATUAN	BASELINE 2024	TARGET					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
Meningkatnya Tingkat Pendidikan Masyarakat		Harapan Lama Sekolah (HLS) - Tahun	12,78	12,85	12,97	13,06	13,16	13,25	13,34
		Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) - Tahun	7,46	7,48	7,49	7,50	7,51	7,52	7,54
	Meningkatnya partisipasi pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 5 – 6 tahun	81,83	84,26	86,69	89,12	91,55	93,98	96,41
		Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 7 – 12 tahun	98,75	98,85	98,95	99,05	99,15	99,25	99,35
		Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 13 – 15 tahun	97,39	97,74	98,1	98,46	98,81	99,17	99,52
	Meningkatnya Kualitas pendidikan	Rata-rata Kemampuan Literasi SD	63,45	65,95	68,45	70,95	73,45	75,95	78,45
		Rata-rata Kemampuan Numerasi SD	57,01	59,91	62,81	65,71	68,61	71,51	74,41
		Rata-rata Kemampuan Literasi SMP	71,02	72,12	73,22	74,32	75,42	76,52	77,62
		Rata-rata Kemampuan Numerasi SMP	63,64	65,14	66,64	68,14	69,64	71,14	72,64
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP PD	83,95	84,25	84,4	84,55	84,6	84,75	84,9

3.2 Strategi dan Arah Kebijakan

3.2.1 Strategi

Guna mencapai seluruh sasaran yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan melalui Rencana Strategis Tahun 2025 – 2029, maka Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan menerapkan strategi dengan menyusun beberapa kebijakan terkait penyelenggaraan urusan penunjang pendidikan dan kebudayaan melalui program dan kegiatan sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 tahun 2025 tentang perubahan ketiga Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Strategi merupakan pernyataan – pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan.

Perumusan strategi mempertimbangkan faktor internal dan eksternal Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan berdasar isu strategis yang telah diidentifikasi dalam bab III Renstra ini. Berdasarkan analisis tersebut, strategi yang akan dijalankan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan dalam kurun waktu perencanaan 5 tahun mendatang dapat di lihat pada Tabel 3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Pendidikan Kabupaten pasuruan.

Tabel 3.2
Penahapan Renstra PD

	TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
RPJMD	Hilirisasi potensi unggulan daerah	Integrasi pembangunan sektoral	Ekspansi pembangunan melalui kolaborasi horizontal dan vertikal	Penguatan daya saing daerah level regional berkelanjutan	Peningkatan level kemajuan dan kesejahteraan masyarakat
Renstra	Meningkatkan rata lama sekolah dan harapan lama sekolah sebagai modal dasar meningkatkan daya saing daerah melalui kewenangan pendidikan dasar.	Meningkatkan pemerataan dan aksesibilitas sarana prasarana pendidikan	Meningkatkan kerjasama dengan lembaga pendidikan, industri dan masyarakat dalam meningkatkan kualitas Pendidikan.	Meningkatkan pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas, meningkatkan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar, dan menciptakan lingkungan pendidikan yang inovatif dan berkelanjutan	Mengembangkan kualitas pendidikan ke level lebih tinggi.

3.2.2 Arah Kebijakan

Salah satu elemen kunci dalam penyusunan Renstra adalah identifikasi arah kebijakan strategis, karena arah kebijakan tersebutlah yang akan menjadi dasar untuk merumuskan kebijakan dan program-program yang akan dilaksanakan selama periode perencanaan. Rumusan arah kebijakan dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan dapat di lihat pada table di bawah ini :

Tabel 3.3

Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah

Arah Kebijakan RPJMD	Strategi Renstra PD	Arah Kebijakan Renstra PD	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
Percepatan Pembangunan Bidang Sosial (kemiskinan, khususnya kemiskinan ekstrim, melalui peningkatan akses hak-hak dasar masyarakat miskin atau termarjinalkan)	1. pemerataan aksesibilitas Pendidikan 2. penanganan anak tidak sekolah (ATS) 3. peningkatan kualitas sarana prasarana Pendidikan 4. peningkatan kualifikasi tenaga pendidik. 5. Peningkatan distribusi pemerataan tenaga pendidik. 6. Peningkatan kualitas pembelajaran berdasarkan perencanaan berbasis data (PBD)	1. Peningkatan partisipasi dan kualitas pendidikan. 2. Pemerataan aksesibilitas Pendidikan 3. Pemerataan tenaga pendidik dan kependidikan.	

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA

Penyusunan indikator rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif memperhatikan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan dalam mendukung tujuan dan sasaran pembangunan daerah sesuai dengan strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Pasuruan 2025 – 2029.

Berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan pada BAB V selanjutnya akan dijabarkan dan direalisasikan dengan penyusunan indikasi rencana program dan kegiatan tahun 2025 – 2029. Indikasi rencana program dalam Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 – 2029 terdiri dari rencana program pembangunan daerah urusan wajib pelayanan dasar yang secara langsung berkontribusi pada pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 – 2029 dan program prioritas. Selain itu disajikan pula target indikator kinerja untuk setiap tahunnya dan pada akhir periode perencanaan disertai pagu indikatif program dan kegiatan yang merupakan jumlah dana yang tersedia untuk mendanai program dan kegiatan tahunan yang penghitungannya berdasarkan standar satuan harga yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sesuai Permendagri 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Permendikbudristek Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan, Dinas Pendidikan melaksanakan tugas dan fungsi melalui program, kegiatan dan subkegiatan berprioritas pada 15 indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan Pendidikan dan prioritas Pembangunan daerah Kabupaten Pasuruan.

4.1 Program, Kegiatan dan Sub kegiatan

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai upaya untuk mengimplementasikan strategi dan kebijakan serta dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran perangkat daerah. Kegiatan maupun Sub Kegiatan merupakan operasional dari program yang bertolok ukur atau memiliki indikator kinerja sebagai alat ukur spesifik yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu kegiatan/sub kegiatan yang dilaksanakan setiap tahunnya.

Program, kegiatan dan subkegiatan urusan Pendidikan yang diampu dan prioritas Adalah berdasarkan subkegiatan yang tertuang pada petunjuk teknis pelaksanaan Standar Pelayanan (SPM) Pendidikan berdasarkan Permendikbudristek Nomor 32 Tahun 2022 yang mengatur jenis dan mutu pelayanan dasar pendidikan untuk setiap peserta didik. Dari regulasi tersebut dapat dilihat bahwasanya subkegiatan yang diampu untuk SPM Pendidikan adalah kurang lebih 86 subkegiatan, dimana seluruh subkegiatan tersebut wajib dilaksanakan agar berdampak langsung terhadap pemenuhan layanan wajib dasar Pendidikan di Kabupaten Pasuruan.

Adapun indikasi program dan kegiatan yang digunakan dalam Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan merupakan program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawab Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan, dengan mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1 – 2850 tahun 2025 tentang perubahan ketiga Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Sehingga di dalam Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 – 2029 hanya mencantumkan 4 (empat) program yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan kegiatan:

- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b. Administrasi Keuangan
 - c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - d. Administrasi Kepegawaian
 - e. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
 - g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan
2. Program Pengelolaan Pendidikan, dengan kegiatan:
- a. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar
 - b. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
 - c. Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
 - d. Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
3. Program Pengembangan Kurikulum, dengan kegiatan:
- a. Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar
 - b. Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal
4. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan, dengan kegiatan
- a. Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan nonformal/kesetaraan

Berikut disampaikan rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan:

Tabel 4.1.1

Rencana Program, Kegiatan, Subkegiatan dan Pendanaan

Kode	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	SATUAN	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2030)		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan (sumber dana)
						2025		2026		2027		2028		2029		2030						
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
01.01.2001	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	TERLAKSANANYA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase dokumen/laporan administrasi PD yang baik/sesuai regulasi Outcome : Meningkatnya kualitas dukungan administrasi dan teknis bagi pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	%	100	100	950.061.103.039	100	972.480.242.787	100	1.122.480.242.787	100	1.122.480.242.787	100	1.122.480.242.787	100	1.122.480.242.787			Sekretariat		

1.01.1.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun Output : Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%	100	100	195.730.000	100	195.730.000	100	195.730.000	100	195.730.000	100	195.730.000	100	195.730.000			Sekretariat		
1.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Kinerja: Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	13	13	66.730.000	13	66.730.000	13	66.730.000	13	66.730.000	13	66.730.000	13	66.730.000			Sekretariat		DAU
1.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Kinerja : Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1															Sekretariat		

[illegible]

1.01.01.2 .01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Tersediany a Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusuna n Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD KInerja : Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dok ume n	1															Sekret ariat		
1.01.01.2 .01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersediany a Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusuna n Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Kinerja : Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Lap oran	12	12	129.00 0.000	12	129.00 0.000	12	129.00 0.000	12	129.00 0.000	12	129.00 0.000	12	129.00 0.000			Sekret ariat		DA U

1.01.01.2 .01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksana nya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kinerja : Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Lap oran	4																	Sekret ariat		
1.01.01. 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksana nya Administra si Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang dikelola secara tertib Output : Tersusunnya dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang dikelola secara tertib	%	100	100	944.97 4.329. 157	100	968.55 6.115. 701	100	1.118. 556.11 5.701	100	1.118. 556.11 5.701	100	1.118. 556.11 5.701	100	1.118. 556.11 5.701					Sekret ariat		
1.01.01.2 .02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersediany a Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah daftar penerima gaji pegawai sesuai anggaran Kinerja : Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Ora ng/ bula n	5647	880 5	935.61 7.831.9 57	880 5	956.27 9.655.7 01	123 05	1.106.2 79.655. 701	123 05	1.106.2 79.655. 701	123 05	1.106.2 79.655. 701	123 05	1.106.2 79.655. 701					Sekret ariat		DA U
1.01.01.2 .02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersediany a Administra si Pelaksana an Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Kinerja : Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dok ume n	12	12	8.959.4 37.200	12	11.879. 400.00 0	12	11.879. 400.00 0	12	11.879. 400.00 0	12	11.879. 400.00 0	12	11.879. 400.00 0					Sekret ariat		DA U

1.01.01.2 .02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Kinerja : Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	1	4	397.06 0.000	4	397.06 0.000	4	397.06 0.000	4	397.06 0.000	4	397.06 0.000	4	397.06 0.000			Sekretariat		DAU
1.01.01. 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase data/bahan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang disiapkan Output : Tersusunnya data/bahan administrasi kepegawaian perangkat daerah	%	100	100	50.000 .000	100	772.00 0.000	100	772.00 0.000	100	772.00 0.000	100	772.00 0.000	100	772.00 0.000			Sekretariat		
1.01.01.2 .05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kinerja : Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Orang	30	130		130	259.44 0.000	130	259.44 0.000	130	259.44 0.000	130	259.44 0.000	130	259.44 0.000			Sekretariat		DAU
1.01.01.2 .05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-	Orang	30	125	0	120	384.00 0.000	120	384.00 0.000	120	384.00 0.000	120	384.00 0.000	120	384.00 0.000			Sekretariat		DAU

		Perundang-Undangan	Undangan Kinerja : Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																			
1.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Kinerja : Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	30	30	50.000.000	30	128.560.000	30	128.560.000	30	128.560.000	30	128.560.000	30	128.560.000			Sekretariat		DAU
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase bahan/data pengelolaan administrasi umum perangkat daerah yang diselesaikan Output : Tersusunnya bahan/data pengelolaan administrasi umum perangkat daerah	%	100	100	1.196.533.060	100	1.499.401.060	100	1.499.401.060	100	1.499.401.060	100	1.499.401.060	100	1.499.401.060			Sekretariat		
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Kinerja : Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Paket	250	100	511.053.060	100	758.021.060	100	758.021.060	100	758.021.060	100	758.021.060	100	758.021.060			Sekretariat		DAU

1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan Kinerja : Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Paket	180000	700	124.990.000	700	149.990.000	700	149.990.000	700	149.990.000	700	149.990.000	700	149.990.000			Sekretariat		DAU
1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kinerja : Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	12	560.490.000	12	591.390.000	12	591.390.000	12	591.390.000	12	591.390.000	12	591.390.000			Sekretariat		DAU
1.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang perangkat daerah yang direalisasikan Output : Terlaksananya pengadaan barang milik daerah penunjang perangkat daerah	%	100	100	-		745.000		745.000		745.000		745.000		745.000			Sekretariat		
1.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Kinerja : Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit	1	1		1	745.000	1	745.000	1	745.000	1	745.000	1	745.000			Sekretariat		

1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa penunjang urusan perangkat daerah yang direalisasikan Output : Terwujudnya jasa penunjang urusan perangkat daerah	%	100	100	1.597.616.532	100	670.000.000	100	670.000.000	100	670.000.000	100	670.000.000	100	670.000.000			Sekretariat		
1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Kinerja : Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Laporan	8	8	1.427.616.531,75	8	500.000.000	8	500.000.000	8	500.000.000	8	500.000.000	8	500.000.000			Sekretariat		DAU
1.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Kinerja : Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Laporan	10	8	170.000.000	8	170.000.000	8	170.000.000	8	170.000.000	8	170.000.000	8	170.000.000			Sekretariat		DAU
1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan perangkat daerah yang dipelihara Output : Terpeliharanya Barang Milik Daerah penunjang urusan perangkat daerah	%	100	100	1.046.894.290	100	786.251.026	100	786.251.026	100	786.251.026	100	786.251.026	100	786.251.026			Sekretariat		

1.01.01.2 .09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersediany a Jasa Pemelihara an, Biaya Pemelihara an dan Pajak Kendaraan Peroranga n Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Kinerja : Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Unit	12	12	876.89 4.290	12	424.25 1.026	12	424.25 1.026	12	424.25 1.026	12	424.25 1.026	12	424.25 1.026			Sekret ariat		DA U
1.01.01.2 .09.0005	Pemeliharaan Mebel	Terlaksana nya Pemelihara an Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara Kinerja : Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Unit	100	100	50.000. 000	100	50.000. 000	100	50.000. 000	100	50.000. 000	100	50.000. 000	100	50.000. 000			Sekret ariat		DA U
1.01.01.2 .09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksana nya Pemelihara an Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Kinerja : Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit				50	212.00 0.000	50	212.00 0.000	50	212.00 0.000	50	212.00 0.000	50	212.00 0.000			Sekret ariat		DA U

1.01.01.2 .09.0009	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksana nya Pemelihara an/Rehabi litasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direha bilitasi Kinerja : Terlaksananya Pemeliharaan/Re habilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Unit	35	1	120.00 0.000	4	100.00 0.000	4	100.00 0.000	4	100.00 0.000	4	100.00 0.000	4	100.00 0.000			Sekret ariat		DA U
1.01.01. 2.13	Penataan Organisasi	Terlaksan anya Penataan Organisasi	Persentase Penataan Organisasi yang dikelola secara tertib Output : Terlaksananya Penataan Organisasi yang dikelola secara tertib	%	100	100	1.000. 000.00 0													Sekret ariat		
1.01.01.2 .13.0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Terlaksana nya Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana Kinerja : Terlaksananya Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Dok ume n	12	12	1.000.0 00.000													Sekret ariat		
01.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		Outcome : Meningkatnya pengelolaan pendidikan				348.22 7.983. 268		320.05 1.947. 325		323.96 2.547. 325		327.52 9.651. 725		329.25 3.651. 725		333.15 9.251. 725			Sekret ariat		
		MENINGK ATNYA PENGELO LAAN PENDIDIK AN	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	%	99,88%	95,1 9	167.05 8.137. 695	95,2 2	139.95 1.426. 869	95,2 5	141.80 9.726. 869	95,2 8	139.95 1.426. 869	95,3 1	139.95 1.426. 869	95,3 4	139.95 1.426. 869	100	-	Bidan g Pembi naan Dikdas		
			Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs	%	84,89%	80,8 5	61.621 .677.9 34	82,4 4	64.053 .925.9 34	84,0 3	64.053 .925.9 34	85,6 2	64.053 .925.9 34	87,2 1	64.053 .925.9 34	88,8	64.053 .925.9 34	96,2	-			

			Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	%	89,32%	90,85	47.939.243.685	90,95	56.587.359.067	91,05	58.031.159.067	91,15	61.931.563.467	91,25	62.680.563.467	91,35	65.361.163.467	92,8	-			
			Angka kelulusan warga belajar kesetaraan	Orang	2117	1312	71.608.923.954	1312	59.459.235.455	1312	60.067.735.455	1312	61.592.735.455	1312	62.567.735.455	1312	63.792.735.455	4500	-			
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar		Output : Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar																			
		Meningkatnya Pengelolaan Pendidikan Dasar	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	%			167.058.137.695		139.951.426.869		141.809.726.869		139.951.426.869		139.951.426.869		139.951.426.869	94,3	-	Bidang Pembinaan Dikdas		
			Iklim Kebhinekaan SD	%	72,24	73,24		74,24		75,24		76,24		77,24		78,24						
			Iklim Keamanan SD	%	75,43	76,33		77,23		78,13		79,03		79,93		80,83						
			Iklim Inklusivitas SD	%	59,39	61,89		64,39		66,89		69,39		71,89		74,39						
1.01.02.2.01.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terbangun	Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terbangun	Jumlah Ruang Guru yang Telah Dibangun Kinerja : Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terbangun	Ruang	2																	
1.01.02.2.01.0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terbangun	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun Kinerja : Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terbangun	Ruang	14			5	1.100.000.000	5	1.100.000.000	5	1.100.000.000	5	1.100.000.000	5	1.100.000.000			Bidang Pembinaan Dikdas		DAU

1.01.02.2 .01.0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Ruang Perpustak aan Sekolah yang Terbangun	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun Kinerja : Ruang Perpustakaan Sekolah yang Terbangun	Rua ng	17			7	1.300.0 00.000	7	1.300.0 00.000	7	1.300.0 00.000	7	1.300.0 00.000	7	1.300.0 00.000			Bidan g Pembi naan Dikdas		DA U
1.01.02.2 .01.0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terbangun	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun Kinerja : Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terbangun	Unit	10	15	3.258.3 00.000	11	1.400.0 00.000	24	3.258.3 00.000	11	1.400.0 00.000	11	1.400.0 00.000	11	1.400.0 00.000			Bidan g Pembi naan Dikdas		DA U
1.01.02.2 .01.0009	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Ruang Guru/Kep ala Sekolah/T U yang Terehabilit asi Sedang/Be rat	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Kinerja : Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Rua ng	6	2	1.100.0 00.000	6	2.446.6 80.000	6	2.446.6 80.000	6	2.446.6 80.000	6	2.446.6 80.000	6	2.446.6 80.000			Bidan g Pembi naan Dikdas		DA U
1.01.02.2 .01.0010	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terehabilit asi Sedang/Be rat	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Kinerja : Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Rua ng				5	1.000.0 00.000	5	1.000.0 00.000	5	1.000.0 00.000	5	1.000.0 00.000	5	1.000.0 00.000			Bidan g Pembi naan Dikdas		DA U

1.01.02.2 .01.0011	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Perpustakaan Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Perpustakaan Sekolah Yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Kinerja : Perpustakaan Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Ruang	3	2	426.43 3.000	5	550.00 0.000	5	550.00 0.000	5	550.00 0.000	5	550.00 0.000	5	550.00 0.000			Bidang Pembinaan Dikdas		DA U
1.01.02.2 .01.0014	Pengadaan Mebel Sekolah	Mebel Sekolah yang Tersedia	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia Kinerja : Mebel Sekolah yang Tersedia	Paket	95	30	7.226.7 00.000	30	990.00 0.000	30	990.00 0.000	30	990.00 0.000	30	990.00 0.000	30	990.00 0.000			Bidang Pembinaan Dikdas		DA U
1.01.02.2 .01.0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/ Lomba Akademik dan Non Akademik	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik Kinerja : Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Peserta Didik	531	200	481.75 9.612	300	490.00 0.000	300	490.00 0.000	300	490.00 0.000	300	490.00 0.000	300	490.00 0.000			Bidang Pembinaan Dikdas		DA U
1.01.02.2 .01.0026	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersedia bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Kinerja : Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersedia bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Orang	-	110 80	2.120.4 00.000	588	2.343.7 01.869	588	2.343.7 01.869	588	2.343.7 01.869	588	2.343.7 01.869	588	2.343.7 01.869			Bidang Pembinaan Dikdas		DA U

1.01.02.2 .01.0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Kinerja : Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang	166			370	250.00 0.000	370	250.00 0.000	370	250.00 0.000	370	250.00 0.000	370	250.00 0.000				Bidang Pembinaan Dikdas		DAU
1.01.02.2 .01.0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Kinerja : Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Satuan Pendidikan	63			50	200.00 0.000	50	200.00 0.000	50	200.00 0.000	50	200.00 0.000	50	200.00 0.000				Bidang Pembinaan Dikdas		DAU

1.01.02.2 .01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Terlaksana nya Pengelolaa n Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS Kinerja : Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasa	Satu an Pen didi kan	723	657	111.53 1.095.0 00	723	111.53 1.095.0 00	723	111.53 1.095.0 00	723	111.53 1.095.0 00	723	111.53 1.095.0 00	723	111.53 1.095.0 00			Bidan g Pembi naan Dikdas		DA U
1.01.02.2 .01.0030	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Meningkat nya Kapasitas Tenaga Pengelola Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar Kinerja : Meningkatnya Kapasitas Tenaga Pengelola Dana BOS Sekolah Dasar	Ora ng	695			160	170.00 0.000	160	170.00 0.000	160	170.00 0.000	160	170.00 0.000	160	170.00 0.000			Bidan g Pembi naan Dikdas		DA U
1.01.02.2 .01.0031	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Ruang Laboratori um Sekolah Dasar yang Terbangun	Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun Kinerja : Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Terbangun	Rua ng	16			5	1.100.0 00.000	5	1.100.0 00.000	5	1.100.0 00.000	5	1.100.0 00.000	5	1.100.0 00.000			Bidan g Pembi naan Dikdas		DA U
1.01.02.2 .01.0032	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Sekolah Dasar	Ruang Laboratori um Sekolah Dasar yang Terehabilit asi Sedang/Be rat	Jumlah Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Kinerja : Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Rua ng				5	1.100.0 00.000	5	1.100.0 00.000	5	1.100.0 00.000	5	1.100.0 00.000	5	1.100.0 00.000			Bidan g Pembi naan Dikdas		DA U

1.01.02.2 .01.0034	Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Dasar	Pelaku perbukuan daerah yang mendapatk an fasilitasi peningkata n profesi	Jumlah Pelaku perbukuan daerah yang mendapatkan fasilitasi peningkatan profesi Kinerja : Pelaku perbukuan daerah yang mendapatkan fasilitasi peningkatan profesi	Oran g				150	150.00 0.000	150	150.00 0.000	150	150.00 0.000	150	150.00 0.000	150	150.00 0.000			Bidan g Pembi naan Dikdas		DA U
1.01.02.2 .01.0035	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Terlaksana nya Pembinaan Pengguna an Teknologi, Informasi dan Komunika si (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan Kinerja : Terlaksananya Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Oran g				50	100.00 0.000	50	100.00 0.000	50	100.00 0.000	50	100.00 0.000	50	100.00 0.000			Bidan g Pembi naan Dikdas		DA U
1.01.02.2 .01.0036	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Terlaksana nya konten digital untuk pendidikan yang dikembang kan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan Kinerja : Terlaksananya konten digital untuk pendidikan yang dikembangkan	Kont en Digit al				50	100.00 0.000	50	100.00 0.000	50	100.00 0.000	50	100.00 0.000	50	100.00 0.000			Bidan g Pembi naan Dikdas		DA U

1.01.02.2 .01.0037	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Terlaksana nya pelatihan pengguna an aplikasi di bidang pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan Kinerja : Terlaksananya pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan	Oran g				50	100.00 0.000	50	100.00 0.000	50	100.00 0.000	50	100.00 0.000	50	100.00 0.000			Bidan g Pemb inaan Dikdas		DA U
1.01.02.2 .01.0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Terlaksana nya Koordinasi , Perencana an, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Kinerja : Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Doku men				1	50.000. 000	1	50.000. 000	1	50.000. 000	1	50.000. 000	1	50.000. 000			Bidan g Pemb inaan Dikdas		DA U
1.01.02.2 .01.0039	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Terlaksana nya kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan Kinerja : Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan	Doku men				150	50.000. 000	150	50.000. 000	150	50.000. 000	150	50.000. 000	150	50.000. 000			Bidan g Pemb inaan Dikdas		DA U

1.01.02.2 .01.0041	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi Kinerja : Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Komunitas				3	130.00 0.000	3	130.00 0.000	3	130.00 0.000	3	130.00 0.000	3	130.00 0.000			Bidang Pembinaan Dikdas		DA U
1.01.02.2 .01.0042	Penyediaan infrastruktur TIK	Tersedianya infrastruktur TIK	Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia Kinerja : Tersedianya infrastruktur TIK	Paket				1	50.000. 000	1	50.000. 000	1	50.000. 000	1	50.000. 000	1	50.000. 000			Bidang Pembinaan Dikdas		DA U
1.01.02.2 .01.0043	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Terlayannya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi Kinerja : Terlayannya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan				4	200.00 0.000	4	200.00 0.000	4	200.00 0.000	4	200.00 0.000	4	200.00 0.000			Bidang Pembinaan Dikdas		DA U
1.01.02.2 .01.0045	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Peserta Didik Menerima Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik Kinerja : Peserta Didik Menerima Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks	Buku				5	10.000. 000	5	10.000. 000	5	10.000. 000	5	10.000. 000	5	10.000. 000			Bidang Pembinaan Dikdas		DA U

1.01.02.2 .01.0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Tersediany a Pengadaan Perlengkap an Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia Kinerja : Tersedianya Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Paket				5	100.00 0.000	5	100.00 0.000	5	100.00 0.000	5	100.00 0.000	5	100.00 0.000			Bidan g Pembi naan Dikdas		DA U
1.01.02.2 .01.0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Ruang Kelas Baru bertambah	Jumlah ruang kelas baru yang bertambah Kinerja : Ruang Kelas Baru bertambah	Rua ng	6	6	3.436.7 21.000	6	1.200.0 00.000	6	1.200.0 00.000	6	1.200.0 00.000	6	1.200.0 00.000	6	1.200.0 00.000			Bidan g Pembi naan Dikdas		DA U
1.01.02.2 .01.0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terehabilit asi Sedang/Be rat	Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat : Sarana Utilitas SMP sederajat (Pagar, Paving, SPL) Kinerja : Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Unit	7	9	2.630.9 49.000	11	1.550.0 00.000	11	1.550.0 00.000	11	1.550.0 00.000	11	1.550.0 00.000	11	1.550.0 00.000			Bidan g Pembi naan Dikdas		DA U

1.01.02.2 .01.0049	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Terlaksananya Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan Kinerja : Terlaksananya Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Orang	-	200	9.475.000	200	291.000.000	200	291.000.000	200	291.000.000	200	291.000.000	200	291.000.000			Bidang Pembinaan Dikdas		DAU
1.01.02.2 .01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Terselenggaranya Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar Kinerja : Terselenggaranya Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Satuan Pendidikan	723			723	200.000.000	723	200.000.000	723	200.000.000	723	200.000.000	723	200.000.000			Bidang Pembinaan Dikdas		DAU
1.01.02.2 .01.0051	Rehabilitasi Sedang/berat Ruang Kelas Sekolah	Ruang Kelas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi Sedang/Berat Kinerja : Ruang Kelas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Ruang	80	28	33.749.890.083,25	50	9.000.000.000	50	9.000.000.000	50	9.000.000.000	50	9.000.000.000	50	9.000.000.000			Bidang Pembinaan Dikdas		DAU

1.01.02.2 .01.0053	Pembangunan Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus	Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Terbangun	Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Dibangun Kinerja : Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Terbangun	Ruang				1	100.00 0.000	1	100.00 0.000	1	100.00 0.000	1	100.00 0.000	1	100.00 0.000			Bidang Pembinaan Dikdas		DA U
1.01.02.2 .01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar Diterima oleh Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik Kinerja : Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar Diterima oleh Peserta Didik	Peserta Didik	-	110 00		107 79	588.95 0.000	107 79	588.95 0.000	107 79	588.95 0.000	107 79	588.95 0.000	107 79	588.95 0.000			Bidang Pembinaan Dikdas		DA U
1.01.02.2 .01.0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia Kinerja : Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Paket	19	11	1.086.4 15.000	10	10.000. 000	10	10.000. 000	10	10.000. 000	10	10.000. 000	10	10.000. 000			Bidang Pembinaan Dikdas		DA U
1.01.02.2 .01.0001	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Sekolah Baru yang Terbangun	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun Kinerja : Sekolah Baru yang Terbangun	Unit				1	100.00 0.000	1	100.00 0.000	1	100.00 0.000	1	100.00 0.000	1	100.00 0.000			Bidang Pembinaan Dikdas		

1.01.02.2 .01.0015	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia	Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia Kinerja : Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia	Pake t				1	50.000. 000	1	50.000. 000	1	50.000. 000	1	50.000. 000	1	50.000. 000			Bidan g Pembi naan Dikdas		
1.01.02.2 .01.0016	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Perlengkap an Sekolah yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia Kinerja : Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Pake t				1	50.000. 000	1	50.000. 000	1	50.000. 000	1	50.000. 000	1	50.000. 000			Bidan g Pembi naan Dikdas		
1.01.02.2 .01.0044	Penataan Ruang/Sudut Baca	Ruang/Su dut Baca yang Tertata	Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Ditata Kinerja : Ruang/Sudut Baca yang Tertata	Rua ng				1	50.000. 000	1	50.000. 000	1	50.000. 000	1	50.000. 000	1	50.000. 000			Bidan g Pembi naan Dikdas		
1.01.02. 2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		Output : Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama																Bidan g Pembi naan Dikdas			
			Tingkat partisipasi warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	%	97,39	97, 74													Bidan g Pembi naan Dikdas			
		Meningkat nya Pengelolan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Iklim Kebhinekaan SMP	%	69,93	70, 93	61.621 .677.9 34	71, 93	64.053 .925.9 34	72, 93	64.053 .925.9 34	73, 93	64.053 .925.9 34	74, 93	64.053 .925.9 34	75, 93	64.053 .925.9 34			Bidan g Pembi naan Dikdas		
			Iklim Keamanan SMP	%	69,48	70, 98		72, 48		73, 98		75, 48		76, 98		78, 48				Bidan g Pembi		

																				naan Dikdas		
			Iklim Inklusivitas SMP	%	56,91	59,31		61,71		64,11		66,51		68,91		71,31				Bidan g Pembi naan Dikdas		
1.01.02.2 .02.0001	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Sekolah Baru yang Terbangun	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun Kinerja : Sekolah Baru yang Terbangun	Unit				1	20.000. 000	1	20.000. 000	1	20.000. 000	1	20.000. 000	1	20.000. 000			Bidan g Pembi naan Dikdas		DA U
1.01.02.2 .02.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Ruang Guru/Kep ala Sekolah/T U yang Terbangun	Jumlah Ruang Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang dibangun Kinerja : Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terbangun	Rua ng	1			2	50.000. 000	2	50.000. 000	2	50.000. 000	2	50.000. 000	2	50.000. 000			Bidan g Pembi naan Dikdas		DA U
1.01.02.2 .02.0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terbangun	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun Kinerja : Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terbangun	Rua ng	1			4	840.00 0.000	4	840.00 0.000	4	840.00 0.000	4	840.00 0.000	4	840.00 0.000			Bidan g Pembi naan Dikdas		DA U
1.01.02.2 .02.0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Perpustak aan Sekolah yang Terbangun	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun Kinerja : Ruang Perpustakaan Sekolah yang Terbangun	Rua ng	1			2	400.00 0.000	2	400.00 0.000	2	400.00 0.000	2	400.00 0.000	2	400.00 0.000			Bidan g Pembi naan Dikdas		DA U

1.01.02.2 .02.0006	Pembangunan Laboratorium	Ruang Laboratori um yang Terbangun	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun Kinerja : Ruang Laboratorium yang Terbangun	Rua ng	2			1	200.00 0.000	1	200.00 0.000	1	200.00 0.000	1	200.00 0.000	1	200.00 0.000			Bidan g Pembi naan Dikdas		DA U
1.01.02.2 .02.0007	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	Ruang Serba Guna/Aul a yang Terbangun	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun Kinerja : Ruang Serba Guna/Aula yang Terbangun	Rua ng				1	200.00 0.000	1	200.00 0.000	1	200.00 0.000	1	200.00 0.000	1	200.00 0.000			Bidan g Pembi naan Dikdas		DA U
1.01.02.2 .02.0011	Pembangunan Kantin Sekolah	Kantin Sekolah yang Terbangun	Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun Kinerja : Kantin Sekolah yang Terbangun	Unit				2	100.00 0.000	2	100.00 0.000	2	100.00 0.000	2	100.00 0.000	2	100.00 0.000			Bidan g Pembi naan Dikdas		DA U
1.01.02.2 .02.0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terbangun	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun Kinerja : Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terbangun	Unit	5	5	1.246.6 40.000	5	500.00 0.000	5	500.00 0.000	5	500.00 0.000	5	500.00 0.000	5	500.00 0.000			Bidan g Pembi naan Dikdas		DA U
1.01.02.2 .02.0014	Rehabilitasi Sedang/berat Ruang Kelas Sekolah	Ruang kelas Sekolah yang Terehabilit asi Sedang/Be rat	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Kinerja : Ruang kelas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Rua ng	37	20	3.482.2 87.934	20	3.500.0 00.000	20	3.500.0 00.000	20	3.500.0 00.000	20	3.500.0 00.000	20	3.500.0 00.000			Bidan g Pembi naan Dikdas		DA U

1.01.02.2 .02.0016	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Be rat	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Kinerja : Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Rua ng				2	300.00 0.000	2	300.00 0.000	2	300.00 0.000	2	300.00 0.000	2	300.00 0.000			Bidan g Pembi naan Dikdas		DA U
1.01.02.2 .02.0017	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Perpustak aan Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Be rat	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Kinerja : Perpustakaan Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Rua ng				3	100.00 0.000	3	100.00 0.000	3	100.00 0.000	3	100.00 0.000	3	100.00 0.000			Bidan g Pembi naan Dikdas		DA U
1.01.02.2 .02.0018	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Laboratori um yang Terehabilitasi Sedang/Be rat	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Kinerja : Laboratorium yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Rua ng	1			3	100.00 0.000	3	100.00 0.000	3	100.00 0.000	3	100.00 0.000	3	100.00 0.000			Bidan g Pembi naan Dikdas		DA U
1.01.02.2 .02.0019	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula	Ruang Serba Guna/Aula yang Terehabilitasi Sedang/Be rat	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi sedang/berat Kinerja : Ruang Serba Guna/Aula yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Rua ng				1	50.000. 000	1	50.000. 000	1	50.000. 000	1	50.000. 000	1	50.000. 000			Bidan g Pembi naan Dikdas		DA U

1.01.02.2 .02.0023	Rehabilitasi Sedang/Berat Kantin Sekolah	Kantin Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Be rat	Jumlah Kantin Sekolah yang Direhabilitasi Sedang/Berat Kinerja : Kantin Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Unit				1	50.000. 000	1	50.000. 000	1	50.000. 000	1	50.000. 000	1	50.000. 000			Bidan g Pembi naan Dikdas		DA U
1.01.02.2 .02.0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Be rat	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Kinerja : Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Unit	3	3	1.024.7 53.000	3	100.00 0.000	3	100.00 0.000	3	100.00 0.000	3	100.00 0.000	3	100.00 0.000			Bidan g Pembi naan Dikdas		DA U
1.01.02.2 .02.0025	Pengadaan Mebel Sekolah	Mebel Sekolah yang Tersedia	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia Kinerja : Mebel Sekolah yang Tersedia	Pake t	19			5	200.00 0.000	5	200.00 0.000	5	200.00 0.000	5	200.00 0.000	5	200.00 0.000			Bidan g Pembi naan Dikdas		DA U
1.01.02.2 .02.0027	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Perlengkap an Sekolah yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia Kinerja : Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Pake t				1	10.000. 000	1	10.000. 000	1	10.000. 000	1	10.000. 000	1	10.000. 000			Bidan g Pembi naan Dikdas		DA U

1.01.02.2 .02.0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama Diterima oleh Peserta Didik	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik Kinerja : Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama Diterima oleh Peserta Didik	Pese rta Didi k	-	140 0	0	138 50	1.466.2 50.000	138 50	1.466.2 50.000	138 50	1.466.2 50.000	138 50	1.466.2 50.000	138 50	1.466.2 50.000				Bidan g Pembi naan Dikdas	DA U
1.01.02.2 .02.0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/ Lomba Akademik dan Non Akademik	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik Kinerja : Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Pese rta Didi k	973	200	2.048.4 50.000	300	450.00 0.000	300	450.00 0.000	300	450.00 0.000	300	450.00 0.000	300	450.00 0.000				Bidan g Pembi naan Dikdas	DA U
1.01.02.2 .02.0039	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pendidik dan Tenaga Kependidik an Tersedia bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Kinerja : Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersedia bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Ora ng	-	150	2.346.0 00.000	150	1.272.6 50.934	150	1.272.6 50.934	150	1.272.6 50.934	150	1.272.6 50.934	150	1.272.6 50.934				Bidan g Pembi naan Dikdas	DA U

1.01.02.2 .02.0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Kinerja : Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang	166			450	250.00 0.000	450	250.00 0.000	450	250.00 0.000	450	250.00 0.000	450	250.00 0.000				Bidang Pembinaan Dikdas		DAU
1.01.02.2 .02.0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Kinerja : Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Satuan Pendidikan	94			50	200.00 0.000	50	200.00 0.000	50	200.00 0.000	50	200.00 0.000	50	200.00 0.000				Bidang Pembinaan Dikdas		DAU

1.01.02.2 .02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah pertama yang Mengelola Dana BOS Kinerja : Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Satuan Pendidikan	161	63	50.085.025.000	165	50.085.025.000	63	50.085.025.000	63	50.085.025.000	63	50.085.025.000	63	50.085.025.000			Bidang Pembinaan Dikdas		DAU
1.01.02.2 .02.0043	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Dana BOS Sekolah Menengah Pertama yang Terkelola dengan Baik	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Kinerja : Dana BOS Sekolah Menengah Pertama yang Terkelola dengan Baik	Orang				150	150.000.000	150	150.000.000	150	150.000.000	150	150.000.000	150	150.000.000			Bidang Pembinaan Dikdas		DAU
1.01.02.2 .02.0047	Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Menengah Pertama	Pelaku perbukuan daerah yang mendapatkan fasilitas peningkatan profesi	Jumlah Pelaku perbukuan daerah yang mendapatkan fasilitas peningkatan profesi Kinerja : Pelaku perbukuan daerah yang mendapatkan fasilitas peningkatan profesi	Orang				150	150.000.000	150	150.000.000	150	150.000.000	150	150.000.000	150	150.000.000			Bidang Pembinaan Dikdas		DAU

1.01.02.2 .02.0048	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Terlaksana nya Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan Kinerja : Terlaksananya Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Ora ng				50	100.00 0.000	50	100.00 0.000	50	100.00 0.000	50	100.00 0.000	50	100.00 0.000				Bidan g Pembi naan Dikdas		DA U
1.01.02.2 .02.0049	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Terlaksana nya konten digital untuk pendidikan yang dikembang kan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan Kinerja : Terlaksananya konten digital untuk pendidikan yang dikembangkan	Kont en Digit al				50	100.00 0.000	50	100.00 0.000	50	100.00 0.000	50	100.00 0.000	50	100.00 0.000				Bidan g Pembi naan Dikdas		DA U
1.01.02.2 .02.0050	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Terlaksana nya pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan Kinerja : Terlaksananya pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan	Ora ng				50	150.00 0.000	50	150.00 0.000	50	150.00 0.000	50	150.00 0.000	50	150.00 0.000				Bidan g Pembi naan Dikdas		DA U

1.01.02.2 .02.0051	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Terlaksana nya Koordinasi , Perencana an, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Kinerja : Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dok ume n				1	50.000. 000	1	50.000. 000	1	50.000. 000	1	50.000. 000	1	50.000. 000				Bidan g Pembi naan Dikdas	DA U
1.01.02.2 .02.0052	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Terlaksana nya kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan Kinerja : Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan	Dok ume n				1	50.000. 000	1	50.000. 000	1	50.000. 000	1	50.000. 000	1	50.000. 000				Bidan g Pembi naan Dikdas	DA U
1.01.02.2 .02.0054	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik Kependidikan	Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi Kinerja : Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Kom unit as				3	150.00 0.000	3	150.00 0.000	3	150.00 0.000	3	150.00 0.000	3	150.00 0.000				Bidan g Pembi naan Dikdas	DA U

1.01.02.2 .02.0055	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Terlayannya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi Kinerja : Terlayannya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan				2	150.00 0.000	2	150.00 0.000	2	150.00 0.000	2	150.00 0.000	2	150.00 0.000				Bidang Pembinaan Dikdas		DA U
1.01.02.2 .02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Terselenggaranya Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar Kinerja : Terselenggaranya Proses Belajar bagi Peserta Didik	Satuan Pendidikan	36.000			160	200.00 0.000	160	200.00 0.000	160	200.00 0.000	160	200.00 0.000	160	200.00 0.000				Bidang Pembinaan Dikdas		DA U
1.01.02.2 .02.0059	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Ruang Kelas Baru Bertambah	Jumlah ruang kelas baru yang bertambah Kinerja : Ruang Kelas Baru bertambah	Ruang	9	10	1.388.5 22.000	10	500.00 0.000	10	500.00 0.000	10	500.00 0.000	10	500.00 0.000	10	500.00 0.000				Bidang Pembinaan Dikdas		DA U

1.01.02.2 .02.0060	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Terlaksananya Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan Kinerja : Terlaksananya Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Orang				160	200.00 0.000	160	200.00 0.000	160	200.00 0.000	160	200.00 0.000	160	200.00 0.000			Bidang Pembinaan Dikdas		DAU
1.01.02.2 .02.0061	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Peserta Didik Menerima Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik Kinerja : Peserta Didik Menerima Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks	Buku				5	10.000. 000	5	10.000. 000	5	10.000. 000	5	10.000. 000	5	10.000. 000			Bidang Pembinaan Dikdas		DAU
1.01.02.2 .02.0062	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia Kinerja : Tersedianya Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Paket				6	110.00 0.000	6	110.00 0.000	6	110.00 0.000	6	110.00 0.000	6	110.00 0.000			Bidang Pembinaan Dikdas		DAU

1.01.02.2 .02.0064	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Ruang Guru/Kep ala Sekolah/T U yang Terehabilit asi Sedang/Be rat	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Kinerja : Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Rua ng				8	880.00 0.000	8	880.00 0.000	8	880.00 0.000	8	880.00 0.000	8	880.00 0.000				Bidan g Pemb inaan Dikdas	DA U
1.01.02.2 .02.0065	Pembangunan Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus	Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutu han Khusus yang Terbangun	Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Dibangun Kinerja : Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Terbangun	Rua ng				1	200.00 0.000	1	200.00 0.000	1	200.00 0.000	1	200.00 0.000	1	200.00 0.000				Bidan g Pemb inaan Dikdas	DA U
1.01.02.2 .02.0067	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia Kinerja : Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Pake t				1	10.000. 000	1	10.000. 000	1	10.000. 000	1	10.000. 000	1	10.000. 000				Bidan g Pemb inaan Dikdas	DA U
1.01.02.2 .02.0068	Penyediaan infrastruktur TIK	Tersediany a infrastrukt ur TIK	Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia Kinerja : Tersedianya infrastruktur TIK	Pake t				1	50.000. 000	1	50.000. 000	1	50.000. 000	1	50.000. 000	1	50.000. 000				Bidan g Pemb inaan Dikdas	DA U

1.01.02.2 .02.0010	Pembangunan Fasilitas Parkir	Fasilitas Parkir yang Terbangun	Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun Kinerja : Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Unit					1	50.000. 000	2	50.000. 000	2	50.000. 000	2	50.000. 000	2	50.000. 000			Bidan g Pembi naan Dikdas		
1.01.02.2 .02.0021	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/ Penjaga Sekolah	Rumah Dinas Kepala Sekolah/G uru/Penja ga Sekolah yang Terehabilit asi Sedang/Be rat	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Pe njaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Kinerja : Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Pe njaga Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Unit					1	200.00 0.000	1	200.00 0.000	1	200.00 0.000	1	200.00 0.000	1	200.00 0.000			Bidan g Pembi naan Dikdas		
1.01.02.2 .02.0022	Rehabilitasi Sedang/Berat Fasilitas Parkir	Fasilitas Parkir yang Terehabilit asi Sedang/Be rat	Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Kinerja : Fasilitas Parkir yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Unit					1	50.000. 000	1	50.000. 000	1	50.000. 000	1	50.000. 000	1	50.000. 000			Bidan g Pembi naan Dikdas		
1.01.02.2 .02.0026	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia	Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia Kinerja : Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersedia bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Pake t					1	50.000. 000	1	50.000. 000	1	50.000. 000	1	50.000. 000	1	50.000. 000			Bidan g Pembi naan Dikdas		

1.01.02.2 .02.0056	Penataan Ruang/Sudut Baca	Ruang/Sudut Baca yang Tertata	Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Ditata Kinerja : Ruang/Sudut Baca yang Tertata	Ruang				1	50.000.000	1	50.000.000	2	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000			Bidang Pembinaan Dikdas		
1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)		Output : Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)																			
		Meningkatnya Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	%	81,83	84,26	47.939.243.685	86,69	56.587.359.067	89,12	58.031.159.067	91,55	61.931.563.467	93,98	62.680.563.467	96,41	65.361.163.467			Bidang Pembinaan PAUD dan PNF		
			Proporsi Jumlah Satuan PAUD Terakreditasi Minimal B	%	76,01	76,42		76,84		77,25		77,66		78,07		78,48						
			Pertumbuhan Proporsi Guru PAUD Formal dengan kualifikasi S1 / D IV	%	76,63	76,81		77,31		77,81		78,31		78,81		79,31						
1.01.02.2 .03.0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Terbangun	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun Kinerja : Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Terbangun	Unit	10			15	750.000.000	17	800.000.000	18	850.000.000	19	900.000.000	22	1.050.000.000			Bidang Pembinaan PAUD dan PNF		DAU
1.01.02.2 .03.0007	Pengadaan Mebel PAUD	Mebel PAUD yang Tersedia	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia Kinerja : Mebel PAUD yang Tersedia	Paket	9	5	104.940.160	6	300.000.000	7	350.000.000	9	400.000.000	10	450.000.000	12	500.000.000			Bidang Pembinaan PAUD		DAU

																				dan PNF		
1.01.02.2 .03.0011	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Biaya Personil Peserta Didik PAUD Diterima oleh Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik Kinerja : Biaya Personil Peserta Didik PAUD Diterima oleh Peserta Didik	Pese rta Didi k				320	231.00 0.000	330	240.00 0.000	340	250.00 0.000	345	245.00 0.000	350	250.00 0.000			Bidan g Pembi naan PAUD dan PNF		DA U
1.01.02.2 .03.0015	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Pendidik dan Tenaga Kependidik an Tersedia bagi PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD Kinerja : Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersedia bagi PAUD	Ora ng				310 0	13.020. 000.00 0	320 0	13.440. 000.00 0	330 0	13.860. 000.00 0	340 0	14.280. 000.00 0	350 0	15.120. 000.00 0			Bidan g Pembi naan PAUD dan PNF		DA U

1.01.02.2 .03.0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Kinerja : Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang	-	45	13.837.628.500	47	375.000.000	50	500.000.000	52	525.000.000	55	550.000.000	60	600.000.000			Bidang Pembinaan PAUD dan PNF		DAU
1.01.02.2 .03.0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Kinerja : Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Satuan Pendidikan	75	1320	254.037.025	1323	326.600.000	1325	350.000.000	1326	355.000.000	1400	400.000.000	180	326.600.000			Bidang Pembinaan PAUD dan PNF		DAU
1.01.02.2 .03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Terlaksananya Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP Kinerja : Terlaksananya Pengelolaan Dana BOP PAUD	Satuan Pendidikan	415	1320	29.747.500.000	1749	29.747.500.000	1760	29.800.500.000	1765	29.855.500.000	1770	30.247.500.000	1780	30.547.500.000			Bidang Pembinaan PAUD dan PNF		DAU

1.01.02.2 .03.0019	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD Kinerja : Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Orang				320	231.000.000	330	240.000.000	340	250.000.000	345	245.000.000	350	250.000.000			Bidang Pembinaan PAUD dan PNF		DAU
1.01.02.2 .03.0022	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Terlaksananya Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan Kinerja : Terlaksananya Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Orang				72	18.000.000	96	24.000.000	120	30.000.000	144	36.000.000	168	42.000.000			Bidang Pembinaan PAUD dan PNF		DAU
1.01.02.2 .03.0024	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Terlaksananya pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan Kinerja : Terlaksananya pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan	Orang				72	18.000.000	96	24.000.000	120	30.000.000	144	36.000.000	168	42.000.000			Bidang Pembinaan PAUD dan PNF		DAU

1.01.02.2 .03.0025	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Terlaksana nya Koordinasi , Perencana an, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Kinerja : Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dok ume n	-	679	39.750. 000	4	231.00 0.000	5	250.00 0.000	6	275.00 0.000	8	280.00 0.000	9	300.00 0.000			Bidan g Pemb inaan PAUD dan PNF		DA U
1.01.02.2 .03.0026	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Terlaksana nya kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan Kinerja : Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan	Dok ume n	-	1	35.233. 000	2	271.60 0.000	3	280.00 0.000	4	300.00 0.000	6	350.00 0.000	7	400.00 0.000			Bidan g Pemb inaan PAUD dan PNF		DA U
1.01.02.2 .03.0028	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Ruang Guru/Kep ala Sekolah/T U yang Terbangun	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun Kinerja : Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terbangun	Rua ng	1			2	150.00 0.000	3	170.00 0.000	5	1.250.0 00.000	7	350.00 0.000	8	400.00 0.000			Bidan g Pemb inaan PAUD dan PNF		DA U

1.01.02.2 .03.0029	Fasilitas Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasiKinerja : Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Komunitas				3	150.00 0.000	3	170.00 0.000	5	250.00 0.000	7	350.00 0.000	8	400.00 0.000			Bidan g Pembi naan PAUD dan PNF		DA U
1.01.02.2 .03.0030	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Ruang Kelas Baru bertambah	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah Kinerja : Ruang Kelas Baru bertambah	Ruang	22	10	550.00 0.000	15	2.250.0 00.000	18	2.750.0 00.000	20	2.850.0 00.000	22	2.950.0 00.000	25	3.050.0 00.000			Bidan g Pembi naan PAUD dan PNF		DA U
1.01.02.2 .03.0031	Penyediaan Infrastruktur TIK	Tersedianya infrastruktur TIK	Jumlah Paket Infrastruktur TIK yang Tersedia Kinerja : Tersedianya infrastruktur TIK	Paket	249	10	170.00 0.000	105	1.102.5 00.000	106	1.102.5 00.000	108	1.202.5 00.000	110	1.302.5 00.000	112	1.402.5 00.000			Bidan g Pembi naan PAUD dan PNF		DA U
1.01.02.2 .03.0038	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula	Ruang Serba Guna/Aula yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi sedang/berat Kinerja : Ruang Serba Guna/Aula yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Ruang				1	100.00 0.000	2	200.00 0.000	3	300.00 0.000	5	350.00 0.000	6	400.00 0.000			Bidan g Pembi naan PAUD dan PNF		DA U
1.01.02.2 .03.0040	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Sekolah Baru yang Terbangun	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun Kinerja : Sekolah Baru yang Terbangun	Unit				2	700.00 0.000	2	700.00 0.000	4	700.00 0.000	5	700.00 0.000	6	700.00 0.000			Bidan g Pembi naan PAUD dan PNF		DA U

1.01.02.2 .03.0045	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Terehabilitasi Sedang/Be rat	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Kinerja : Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Unit	5	10	60.000. 000	14	700.00 0.000	14	725.00 0.000	15	770.00 0.000	16	790.00 0.000	18	800.00 0.000			Bidan g Pembi naan PAUD dan PNF		DA U
1.01.02.2 .03.0046	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia	Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia Kinerja : Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia	Pake t	61	20	2.160.1 55.000	20	1.336.5 95.600	20	1.336.5 95.600	20	2.850.0 00.000	22	2.950.0 00.000	25	3.050.0 00.000			Bidan g Pembi naan PAUD dan PNF		DA U
1.01.02.2 .03.0047	Penyelenggaraa n Proses Belajar PAUD	Terselengg aranya Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar Kinerja : Terselenggaranya Proses Belajar PAUD	Satu an Pen didi kan	37.856			250	648.00 0.000	250	648.00 0.000	260	748.00 0.000	270	788.00 0.000	280	800.00 0.000			Bidan g Pembi naan PAUD dan PNF		DA U
1.01.02.2 .03.0049	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Ruang Guru/Kep ala Sekolah/T U yang Terehabilitasi sedang/be rat	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Kinerja : Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Rua ng				5	375.00 0.000	5	375.00 0.000	5	375.00 0.000	5	375.00 0.000	5	375.00 0.000			Bidan g Pembi naan PAUD dan PNF		DA U

1.01.02.2 .03.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Ruang Kelas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Be rat	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Kinerja : Ruang kelas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Rua ng	22	3	980.00 0.000	54	3.555.5 63.467	54	3.555.5 63.467	56	3.655.5 63.467	58	3.755.5 63.467	62	4.555.5 63.467			Bidan g Pembi naan PAUD dan PNF		DA U
1.01.02. 2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Meningkat nya Pengelola an Pendidika n Nonformal /Kesetara an	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	%	35,47	43, 68	71.608 .923.9 54	51, 88	59.459 .235.4 55	58, 37	60.067 .735.4 55	64, 86	61.592 .735.4 55	71, 35	62.567 .735.4 55	72, 12	63.792 .735.4 55			Bidan g Pembi naan PAUD dan PNF		
			Output : Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan																	Bidan g Pembi naan PAUD dan PNF		
1.01.02.2 .04.0010	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Biaya Personil Peserta Didik Nonformal /Kesetaraan diterima oleh peserta didik	Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik Kinerja : Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan diterima oleh peserta didik	Pese rta Didi k				22	454.54 5.455	23	464.54 5.455	25	484.54 5.455	28	554.54 5.455	33	654.54 5.455			Bidan g Pembi naan PAUD dan PNF		DA U

1.01.02.2 .04.0015	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pendidik dan tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Kinerja : Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang	263	188	816.50 0.000	88	491.50 0.000	90	500.00 0.000	92	525.00 0.000	94	550.00 0.000	98	565.00 0.000			Bidang Pembinaan PAUD dan PNF		DA U
1.01.02.2 .04.0016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Kinerja : Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Satuan Pendidikan	2.783	280 0	27.081. 088.50 0	211 5	27.640. 000.00 0	211 5	27.740. 000.00 0	211 8	27.840. 000.00 0	220 0	27.940. 000.00 0	230 0	28.040. 000.00 0			Bidang Pembinaan PAUD dan PNF		DA U

1.01.02.2 .04.0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kes etaraan	Terlaksana nya Pengelolaa n Dana BOP Sekolah Nonformal /Kesetaraa n	Jumlah Sekolah Nonformal/Keseta raan yang Mengelola Dana BOP Kinerja : Terlaksananya Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Keseta raan	Satu an Pen didi kan	2.680	270 0	39.176. 335.45 4	275 0	12.904. 590.00 0	277 0	12.924. 590.00 0	288 0	12.984. 590.00 0	290 0	12.994. 590.00 0	290 5	13.204. 590.00 0			Bidan g Pembi naan PAUD dan PNF		DA U
1.01.02.2 .04.0018	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kes etaraan	Meningkat nya Kapasitas Pengelolaa n Dana BOP Sekolah Nonformal /Kesetaraa n	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Keseta raan Kinerja : Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Keseta raan	Ora ng				120	220.00 0.000	130	320.00 0.000	140	360.00 0.000	150	380.00 0.000	160	420.00 0.000			Bidan g Pembi naan PAUD dan PNF		DA U
1.01.02.2 .04.0027	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Terlaksana nya Koordinasi , Perencana an, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Kinerja : Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dok ume n	675			2	220.00 0.000	2	220.00 0.000	2	220.00 0.000	2	220.00 0.000	2	220.00 0.000			Bidan g Pembi naan PAUD dan PNF		DA U

1.01.02.2 .04.0039	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Ruang Kelas Baru bertambah	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah Kinerja : Ruang Kelas Baru bertambah	Ruang	25	10	1.870.000.000	12,00	1.800.000.000	13,00	1.900.000.000	14,00	2.000.000.000	16,00	2.080.000.000	18,00	2.100.000.000			Bidang Pembinaan PAUD dan PNF		DAU
1.01.02.2 .04.0041	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Kinerja : Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Unit		10	50.000.000	6	300.000.000	7	320.000.000	8	340.000.000	10	370.000.000	11	400.000.000			Bidang Pembinaan PAUD dan PNF		DAU
1.01.02.2 .04.0046	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Terselenggaranya Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyenggarakan Proses Belajar Kinerja : Terselenggaranya Proses Belajar bagi Peserta Didik	Peserta Didik	1.156			1340	12.858.600.000	1350	12.958.600.000	1355	13.858.600.000	1360	14.058.600.000	1370	14.358.600.000			Bidang Pembinaan PAUD dan PNF		DAU
1.01.02.2 .04.0052	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal	Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal yang Terbangun	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal yang Telah Dibangun Kinerja : Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal yang Terbangun	Unit				2	200.000.000	4	250.000.000	5	300.000.000	7	400.000.000	8	450.000.000			Bidang Pembinaan PAUD dan PNF		DAU

1.01.02.2 .04.0060	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Ruang Guru/Kep ala Sekolah/T U yang Terehabilit asi Sedang/Be rat	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Kinerja : Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Rua ng				4	300.00 0.000	5	300.00 0.000	7	400.00 0.000	8	450.00 0.000	10	500.00 0.000			Bidan g Pembi naan PAUD dan PNF		DA U
1.01.02.2 .04.0061	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Ruang Kelas Sekolah yang Terehabilit asi Sedang/Be rat	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Kinerja : Ruang Kelas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Rua ng	44	20	2.615.0 00.000	30	2.070.0 00.000	32	2.170.0 00.000	37	2.280.0 00.000	40	2.570.0 00.000	50	2.880.0 00.000			Bidan g Pembi naan PAUD dan PNF		DA U
01.01.04	PROGRAM PENGEMBANG AN KURIKULUM		Outcome : Meningkatnya Pengembangan Kurikulum																Bidan g Pembi naan PAUD dan PNF			
		MENINGK ATNYA PENGEMB ANGAN KURIKUL UM	Persentase satuan pendidikan yang mengembangkan dan melaksanakan kurikulum satuan pendidikan	%				100	470.00 0.000	100	470.00 0.000	100	470.00 0.000	100	470.00 0.000	100	470.00 0.000					
1.01.03. 2.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Meningkat nya Penetapan Kurikulu m Muatan Lokal	Persentase kurikulum muatan lokal satuan pendidikan dasar yang ditetapkan	%				100	150.00 0.000	100	150.00 0.000	100	150.00 0.000	100	150.00 0.000	100	150.00 0.000			Bidan g Pembi naan Dikdas		

		Pendidika n Dasar																				
			Output : Terlaksananya kurikulum muatan lokal satuan pendidikan dasar yang ditetapkan																			
1.01.03.2 .01.0004	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar Meningkat Kompetens inya	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkatkan Kompetensinya Kinerja : Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar Meningkat Kompetensinya	Ora ng				40	150.00 0.000	40	150.00 0.000	40	150.00 0.000	40	150.00 0.000	40	150.00 0.000			Bidan g Pembi naan Dikdas		DA U
1.01.03. 2.02	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal		Persentase kurikulum muatan lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang ditetapkan																			
		Meningkat nya Penetapan Kurikulu m Muatan Lokal Pendidika n Anak Usia Dini dan Pendidika n Nonformal	Output : Terlaksananya kurikulum muatan lokal satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang ditetapkan	%				100	320.00 0.000	100	320.00 0.000	100	320.00 0.000	100	320.00 0.000	100	320.00 0.000			Bidan g Pembi naan PAUD dan PNF		

1.01.03.2 .02.0002	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Tersusun	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun Kinerja : Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Tersusun	Dok ume n				3	160.00 0.000	3	160.00 0.000	3	160.00 0.000	3	160.00 0.000	3	160.00 0.000				Bidan g Pemb inaan PAUD dan PNF		DA U
1.01.03.2 .02.0006	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Tersusunnya Kompetensi Dasar/Cap aian Pembelajar an Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun Kinerja : Tersusunnya Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Dok ume n				3	160.00 0.000	3	160.00 0.000	3	160.00 0.000	3	160.00 0.000	3	160.00 0.000				Bidan g Pemb inaan PAUD dan PNF		DA U
01.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKA N		Outcome : Meningkatnya pemenuhan pendidik dan tenaga kependidikan																				

1.01.04.2 .01.0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Tersedianya Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Kinerja : Tersedianya Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Dokumen	246	246	437.74 2.000	31	419.45 0.000	31	437.74 2.000	31	437.74 2.000	31	437.74 2.000	31	437.74 2.000				Bidang Pembinaan Ketenagaan		DA U
-----------------------	--	--	---	---------	-----	-----	-----------------	----	-----------------	----	-----------------	----	-----------------	----	-----------------	----	-----------------	--	--	--	-----------------------------------	--	---------

1.01.04.2 .01.0002	Penataan Pendistribusia n Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kes etaraan	Terlaksana nya Penataan Pendistrib usian Pendidik dan Tenaga Kependidik an Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal /Kesetaraa n	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraa n Kinerja : Terlaksananya Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Keseta raan	Lap oran	15	15	115.34 3.000	25	217.39 4.219	25	115.34 3.000	25	115.34 3.000	25	115.34 3.000	25	115.34 3.000				Bidan g Pembi naan Keten agaan		DA U
-----------------------	---	---	---	-------------	----	----	-----------------	----	-----------------	----	-----------------	----	-----------------	----	-----------------	----	-----------------	--	--	--	---	--	---------

Perencanaan pada tahun 2025 – 2029, bisa dilihat pada tabel diatas. Prioritas tujuan utama Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan dengan sasaran meningkatnya angka rata lama sekolah sudah mulai di laksanakan pada tahun 2023 dan pada tahun 2024 menjadikan salah satu prioritas dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 – 2029 dengan kebijakan utama mengoptimalisasi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di Kabupaten Pasuruan. Langkah konkrit untuk meningkatkan nilai rata lama sekolah melalui optimalisasi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) adalah salah satunya dengan rencana untuk membuka kelas jauh bagi PKBM yang sudah ada agar bisa melayani warga belajar dalam hal mendapat pendidikan formal.

Untuk meningkatkan Rata Lama Sekolah sebagaimana prioritas RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 – 2029 dan Prioritas Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan Tahun 2024, pada tahun 2023 sudah di rencanakan dan dianggarkan dalam rangka peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang di masukkan pada Kegiatan *Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan* sub kegiatan *Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan* dimana program tersebut akan diteruskan pada tahun – tahun berikutnya. Anggaran tersebut dipergunakan untuk Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Kesetaraan bagi warga belajar yang tidak tercover oleh bantuan operasional pusat karena terkendala oleh aturan Permendikdasmen No. 8 Tahun 2025 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan dimana bantuan operasional tersebut hanya diberikan bagi warga belajar sampai dengan batas usia 25 tahun, sedangkan yang terjadi di Kabupaten Pasuruan juga banyak warga belajar dengan usia diatas 25 tahun yang akhirnya belum bisa terakomodir Bantuan Operasional Satuan Pendidikan tersebut. Hal ini bisa dilihat sebagai perbandingan yaitu pada anggaran sub kegiatan tersebut di tahun 2023 adalah sebesar Rp. 8.305.914.000 dan pada tahun 2024 sebesar Rp. 11.451.964.200 mengalami peningkatan anggaran sebesar 37,88%.

Tabel 4.1.2

Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

No	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET	AKTIFITAS KEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Program Pengelolaan Pendidikan	Meningkatnya Pengelolaan Pendidikan	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 1.01.02.2.01.0026 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 1.01.02.2.02.0039 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Astacita : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas; Program Prioritas Pembangunan Daerah : Peningkatan Kesejahteraan Pendidik baik formal maupun non formal	Peningkatan kesejahteraan pendidik baik formal maupun non formal;

No	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET	AKTIFITAS KEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 1.01.02.2.01.0025 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa 1.01.02.2.01.0027 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar 1.01.02.2.01.0028 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 1.01.02.2.01.0030 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 1.01.02.2.01.0034 Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Dasar 1.01.02.2.01.0035 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan 1.01.02.2.01.0036 Pengembangan konten digital untuk pendidikan 1.01.02.2.01.0037 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan 1.01.02.2.01.0038 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 1.01.02.2.01.0039 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan 1.01.02.2.01.0041 Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan 1.01.02.2.01.0043 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan	Astacita : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas; Program Prioritas Pembangunan Daerah : Peningkatan kualitas sarana prasarana, akses serta kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang pendidikan dan kesehatan;	Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang pendidikan

No	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET	AKTIFITAS KEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi 1.01.02.2.01.0049 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan 1.01.02.2.01.0050 Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik 1.01.02.2.01.0054 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar 1.01.03.2.01.0002 Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar 1.01.03.2.01.0003 Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar 1.01.03.2.01.0004 Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar 1.01.03.2.01.0005 Pelaksanaan penilaian/penelaahan buku teks muatan lokal Pendidikan Dasar 1.01.03.2.01.0006 Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Dasar 1.01.03.2.01.0007 Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 1.01.02.2.02.0038 Pembinaan Minat,		

No	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET	AKTIFITAS KEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			Bakat dan Kreativitas Siswa 1.01.02.2.02.0032 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama 1.01.02.2.02.0040 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 1.01.02.2.02.0041 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah 1.01.02.2.02.0042 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama 1.01.02.2.02.0043 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama 1.01.02.2.02.0047 Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Menengah Pertama 1.01.02.2.02.0048 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan 1.01.02.2.02.0049 Pengembangan konten digital untuk pendidikan 1.01.02.2.02.0050 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan 1.01.02.2.02.0051 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 1.01.02.2.02.0052 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan 1.01.02.2.02.0054 Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan 1.01.02.2.02.0055 Pemberian layanan		

No	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET	AKTIFITAS KEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi 1.01.02.2.02.0058 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik 1.01.02.2.02.0060 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan		

		Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 1.01.02.2.01.0001 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) 1.01.02.2.01.0003 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU 1.01.02.2.01.0004 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah 1.01.02.2.01.0005 Pembangunan Perpustakaan Sekolah 1.01.02.2.01.0007 Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah 1.01.02.2.01.0006 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 1.01.02.2.01.0009 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU 1.01.02.2.01.0010 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah 1.01.02.2.01.0013 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah 1.01.02.2.01.0014 Pengadaan Mebel Sekolah 1.01.02.2.01.0015 Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah 1.01.02.2.01.0016 Pengadaan Perlengkapan Sekolah 1.01.02.2.01.0031 Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar 1.01.02.2.01.0032 Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Sekolah Dasar 1.01.02.2.01.0045 Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Astacita : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas; Program Prioritas Pembangunan Daerah : Peningkatan kualitas sarana prasarana, akses serta kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang pendidikan dan kesehatan;	Peningkatan kualitas sarana prasarana, Berupa Pembangunan dan Rehabilitasi Sarana Prasarana Pendidikan
--	--	--	--	---

		1.01.02.2.01.0046 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik 1.01.02.2.01.0053 Pembangunan Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus 1.01.02.2.01.0055 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik 1.01.02.2.01.0011 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah 1.01.02.2.01.0047 Pembangunan Ruang Kelas Baru 1.01.02.2.01.0048 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 1.01.02.2.01.0051 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah 1.01.02.2.01.0042 Penyediaan infrastruktur TIK 1.01.02.2.01.0044 Penataan Ruang/Sudut Baca Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 1.01.02.2.02.0001 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) 1.01.02.2.02.0003 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU 1.01.02.2.02.0004 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah 1.01.02.2.02.0005 Pembangunan Perpustakaan Sekolah 1.01.02.2.02.0006 Pembangunan Laboratorium 1.01.02.2.02.0007 Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula 1.01.02.2.02.0008 Pembangunan Asrama Sekolah	
--	--	---	--

		1.01.02.2.02.0009 Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah 1.01.02.2.02.0010 Pembangunan Fasilitas Parkir 1.01.02.2.02.0011 Pembangunan Kantin Sekolah 1.01.02.2.02.0016 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah 1.01.02.2.02.0017 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah 1.01.02.2.02.0018 Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium 1.01.02.2.02.0019 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula 1.01.02.2.02.0021 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah 1.01.02.2.02.0022 Rehabilitasi Sedang/Berat Fasilitas Parkir 1.01.02.2.02.0023 Rehabilitasi Sedang/Berat Kantin Sekolah 1.01.02.2.02.0025 Pengadaan Mebel Sekolah 1.01.02.2.02.0026 Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah 1.01.02.2.02.0027 Pengadaan Perlengkapan Sekolah 1.01.02.2.02.0056 Penataan Ruang/Sudut Baca 1.01.02.2.02.0062 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik 1.01.02.2.02.0063 Rehabilitasi Sedang/Berat Asrama Sekolah 1.01.02.2.02.0064 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala		
--	--	---	--	--

			Sekolah/TU 1.01.02.2.02.0065 Pembangunan Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus 1.01.02.2.02.0067 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik 1.01.02.2.02.0068 Penyediaan infrastruktur TIK 1.01.02.2.02.0012 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 1.01.02.2.02.0014 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah 1.01.02.2.02.0024 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 1.01.02.2.02.0059 Pembangunan Ruang Kelas Baru		
--	--	--	--	--	--

No	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET	AKTIFITAS KEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			1.01.02.2.03.0016 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Astacita : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas; Program Prioritas Pembangunan Daerah : Peningkatan kualitas sarana prasarana, akses serta kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang pendidikan dan kesehatan;	Peningkatan kesejahteraan pendidik baik formal maupun non formal;

No	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET	AKTIFITAS KEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 1.01.02.2.03.0002 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas 1.01.02.2.03.0007 Pengadaan Mebel PAUD 1.01.02.2.03.0028 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU 1.01.02.2.03.0030 Pembangunan Ruang Kelas Baru 1.01.02.2.03.0031 Penyediaan Infrastruktur TIK 1.01.02.2.03.0038 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula 1.01.02.2.03.0045 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD 1.01.02.2.03.0051 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Astacita : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas; Program Prioritas Pembangunan Daerah : Peningkatan kualitas sarana prasarana, akses serta kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang pendidikan dan kesehatan;	Rehab, Pembangunan dan TIK

No	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET	AKTIFITAS KEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 1.01.02.2.03.0011 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD 1.01.02.2.03.0015 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD 1.01.02.2.03.0016 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD 1.01.02.2.03.0017 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD 1.01.02.2.03.0025 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 1.01.02.2.03.0026 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan 1.01.02.2.03.0029 Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan 1.01.02.2.03.0047 Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Astacita : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas; Program Prioritas Pembangunan Daerah : Peningkatan kualitas sarana prasarana, akses serta kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang pendidikan dan kesehatan;	Peningkatan kesejahteraan pendidik baik formal maupun non formal;

No	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET	AKTIFITAS KEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 1.01.02.2.04.0010 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan 1.01.02.2.04.0015 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 1.01.02.2.04.0016 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan 1.01.02.2.04.0017 Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan 1.01.02.2.04.0018 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan 1.01.02.2.04.0027 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 1.01.02.2.04.0046 Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Astacita : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas; Program Prioritas Pembangunan Daerah : Peningkatan kesejahteraan pendidik baik formal maupun non formal;	Peningkatan kesejahteraan pendidik baik formal maupun non formal;

No	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET	AKTIFITAS KEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 1.01.02.2.04.0039 Pembangunan Ruang Kelas Baru 1.01.02.2.04.0041 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 1.01.02.2.04.0061 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Astacita : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas; Program Prioritas Pembangunan Daerah : Peningkatan kualitas sarana prasarana, akses serta kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang pendidikan dan kesehatan;	Rehab dan Pembangunan

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

4.2.1 Kinerja Tujuan dan Sasaran Renstra

Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*). Keberadaan indikator kinerja sangat penting baik dalam evaluasi kinerja program-program pembangunan daerah. Indikator kinerja menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan, monitoring dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah. Dalam perencanaan pembangunan daerah, indikator menjadi ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan.

Adapun indikator kinerja bidang urusan pendidikan dan kebudayaan merupakan indikator kinerja yang akan menjadi tanggung jawab Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan. Indikator ini merupakan penghubung antara kinerja program dengan tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Indikator kinerja utama Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 – 2029 disajikan sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 4.2.1
Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan

NO	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						Keterangan
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	12,78	12,87	12,97	13,06	13,16	13,25	13,34	
2	Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	7,46	7,47	7,49	7,50	7,51	7,52	7,54	
3	Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 5 – 6 tahun	%	81,83	84,26	86,69	89,12	91,55	93,98	96,41	

NO	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						Keterangan
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
4	Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 7 – 12 tahun	%	98,75	98,85	98,95	99,05	99,15	99,25	99,35	
5	Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 13 – 15 tahun	%	97,39	97,74	98,1	98,46	98,81	99,17	99,52	
6	Rata-rata Kemampuan Literasi SD	-	63,45	65,95	68,45	70,95	73,45	75,95	78,45	
7	Rata-rata Kemampuan Numerasi SD	-	57,01	59,91	62,81	65,71	68,61	71,51	74,41	
8	Rata-rata Kemampuan Literasi SMP	-	71,02	72,12	73,22	74,32	75,42	76,52	77,62	
9	Rata-rata Kemampuan Numerasi SMP	-	63,64	65,14	66,64	68,14	69,64	71,14	72,64	
10	Nilai SAKIP PD	-	83,95	84,25	84,4	84,55	84,6	84,75	84,9	

4.2.2 Kinerja Penyelenggara Urusan

Adapun untuk kinerja penyelenggaraan urusan Pendidikan yang menjadi Indikator Kinerja Kunci Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan yang mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 – 2029 bisa di lihat pada table berikut:

Tabel 4.2.2

Indikator Kinerja Kunci Dinas Pendidikan

NO	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	IKK									
1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	%	83,97	88,28	89,28	90,28	91,28	92,28	93,28	

NO	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	%	98,75	99,75	100	100	100	100	100	
3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	%	82,49	83,49	84,49	85,49	86,49	87,49	88,49	
4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah dalam pendidikan kesetaraan	%	57,32	58,32	59,32	60,32	61,32	62,32	63,32	
Indikator SPM										
5	Skor Kemampuan Literasi SD	-	63,45	65,95	68,45	70,95	73,45	75,95	78,45	
6	Skor Kemampuan Numerasi SD	-	57,01	59,91	62,81	65,71	68,61	71,51	74,41	
7	Skor Kemampuan Literasi SMP	-	71,02	72,12	73,22	74,32	75,42	76,52	77,62	
8	Skor Kemampuan Numerasi SMP	-	63,64	65,14	66,64	68,14	69,64	71,14	72,64	
9	Proporsi Jumlah Satuan PAUD Terakreditasi Minimal B	%	76,01	76,42	76,84	77,25	77,66	78,07	78,48	
10	Proporsi Guru PAUD dengan Kualifikasi S1/D4	%	76,63	76,81	77,31	77,81	78,31	78,81	79,31	
11	Iklim Kebinekaan SD	%	72,24	73,24	74,24	75,24	76,24	77,24	78,24	
12	Iklim Keamanan SD	%	75,43	76,33	77,23	78,13	79,03	79,93	80,83	
13	Iklim Inklusivitas SD	%	59,39	61,89	64,39	66,89	69,39	71,89	74,39	
14	Iklim Kebinekaan SMP	%	69,93	70,93	71,93	72,93	73,93	74,93	75,93	
15	Iklim Keamanan SMP	%	69,48	70,98	72,48	73,98	75,48	76,98	78,48	
16	Iklim Inklusivitas SMP	%	56,91	59,31	61,71	64,11	66,51	68,91	71,31	

NO	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Indikator Kinerja lainnya									
17	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	%	95,16	95,19	95,22	95,25	95,28	95,31	95,34	
18	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs	%	79,26	80,85	82,44	84,03	85,62	87,21	88,8	
19	APK PAUD	%	90,75	90,85	90,95	91,05	91,15	91,25	91,35	
20	Angka kelulusan warga belajar	Orang	2.117	1312	1350	1360	1380	1400	1500	
21	Prosentase pemenuhan kebutuhan PTK di semua jenjang pendidikan	%	76,47	76,46	82,49	82,57	82,65	82,73	82,81	

BAB V

PENUTUP

Renstra perangkat daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Pasuruan harus konsisten dan sinergis dengan dokumen RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 – 2029. Oleh karena itu Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan pada RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 – 2029. Renstra adalah dokumen indikatif yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah. Renstra yang mengatur perencanaan pembangunan jangka menengah perangkat daerah akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah. Guna kepentingan pelaksanaan Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 – 2029 maka kaidah-kaidah pelaksanaan yang perlu ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. Sekretaris dan Bidang pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan berkewajiban menjamin konsistensi penyusunan Renja Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan dengan berpedoman pada Renstra Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 – 2029, agar pencapaian target-target Renstra dapat tercapai.
2. Prinsip-prinsip yang perlu dipedomani dalam penguatan peran para pelaku dalam pelaksanaan Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 – 2029 antara lain adalah kemitraan, transparansi, akuntabilitas, peningkatan profesionalisme, partisipasi, keberpihakan terhadap kepentingan publik, dan komitmen moral yang tinggi dalam segala proses pembangunan.
3. Dalam rangka menjamin efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program/kegiatan serta memastikan konsistensi pencapaian target-target Renstra, maka perlu dilakukan pengendalian, monitoring dan evaluasi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 – 2029 dimungkinkan diubah apabila hasil pengendalian, monitoring dan

evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan, hasil pengendalian, monitoring dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku (perubahan kebijakan), serta apabila terjadi perubahan yang mendasar seperti: terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, dan/atau perubahan kebijakan nasional maupun terjadi perubahan struktur organisasi perangkat daerah